



Laporan Kinerja

Pusat Penyuluhan KP

Triwulan III-2025

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2025**



Laporan Kinerja

Pusat Penyuluhan KP

Triwulan III-2025

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan **“Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025”** dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025 memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai pada Triwulan III, baik *makro* maupun *mikro* serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan guna memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan



Yayan Hikmayani, S.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	5
D. Keragaan Pegawai	11
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2025	17
F. Potensi dan Permasalahan	17
PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Rencana Kerja Tahun 2025.....	26
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
D. Pengukuran Kinerja.....	30
AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	35
C. Akuntabilitas Keuangan.....	68
D. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya	77
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Permasalahan dan Tindaklanjut	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025	11
Tabel 2	Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja dan pendidikan Per 30 September 2025	14
Tabel 3	Sebaran Penyuluh di Provinsi pada Satker/Satminkal lingkup Penyuluhan KP	15
Tabel 4	Revisi Rencana Kerja Pusat Penyuluhan KP TA 2025	26
Tabel 5	Anggaran unit kerja dilingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	27
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun Anggaran 2025	29
Tabel 7	Revisi Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun Anggaran 2025	30
Tabel 8	Bobot validasi IKK	30
Tabel 9	Klasifikasi target indikator kinerja	31
Tabel 10	Status Capaian Nilai Kinerja	32
Tabel 11	Capaian IKK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025	35
Tabel 12	Capaian IKK 1-Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang ...	38
Tabel 13	Rincian capaian Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh	38
Tabel 14	Capaian IKK 2-Kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	41
Tabel 15	Rincian capaian Kelompok Pelaku usaha/pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya	42
Tabel 16	Rincian Peningkatan kelas kelompok berdasarkan bidang usaha	43
Tabel 17	Capaian IKK 3-Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)	46
Tabel 18	Rincian capaian Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku pendukung yang Dibentuk	46
Tabel 19	Capaian IKK 4- Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	49
Tabel 20	Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja Lingkup Pusluh KP	50
Tabel 21	Capaian IKK 5- Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)	51
Tabel 22	Rincian capaian Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan	52

Tabel 23 Kerjasama lingkup Pusat penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025	60
Tabel 24 Capaian IKK 17 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%).....	61
Tabel 25 Nilai Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPPSDM Triwulan III Tahun 2025.....	62
Tabel 26 Perbandingan IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya	63
Tabel 27 Capaian IKK 22 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%).....	66
Tabel 28. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Triwulan III Tahun 2025	67
Tabel 29 Revisi Anggaran Pusat Penyuluhan KP sampai dengan Triwulan III Tahun 2025	69
Tabel 30 Realisasi Anggaran Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025.....	70
Tabel 31 Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan III Tahun 2025	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025	5
Gambar 2. Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pusat Penyuluhan KP.....	7
Gambar 3. Distribusi Status Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025	11
Gambar 4 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup Pusluh KP	12
Gambar 5 Persentase Jumlah Pegawai Lingkup Pusluh KP berdasarkan Gender.....	13
Gambar 6 Sebaran Kelas Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pusluh KP	13
Gambar 7 Diagram Sebaran PNS menurut Tingkat Pendidikan	14
Gambar 8 Sebaran penyuluh kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia	16
Gambar 9 Sebaran Penyuluh Perikanan Lingkup UPT/Satminkal Penyuluhan KP (data per 30 September 2025).....	15
Gambar 10. Komposisi anggaran Lingkup Penyuluhan KP	28
Gambar 11 Nilai NKO Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Aplikasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025.....	34
Gambar 12. Sebaran bidang usaha kelompok disuluh Triwulan III Tahun 2025	39
Gambar 13. Persentase kelompok ditingkatkan kelasnya Triwulan III Tahun 2025	43
Gambar 14 Persentase kelompok yang ditingkatkan kelasnya berdasarkan bidang usaha Triwulan III Tahun 2025	44
Gambar 15 Persentase bidang usaha kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang dibentuk Triwulan III Tahun 2025	47
Gambar 16 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%).....	63
Gambar 17. Realisasi anggaran Lingkup Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025	68
Gambar 18. Persentase Realisasi anggaran Lingkup Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025	71

RINGKASAN EKSEKUTIF

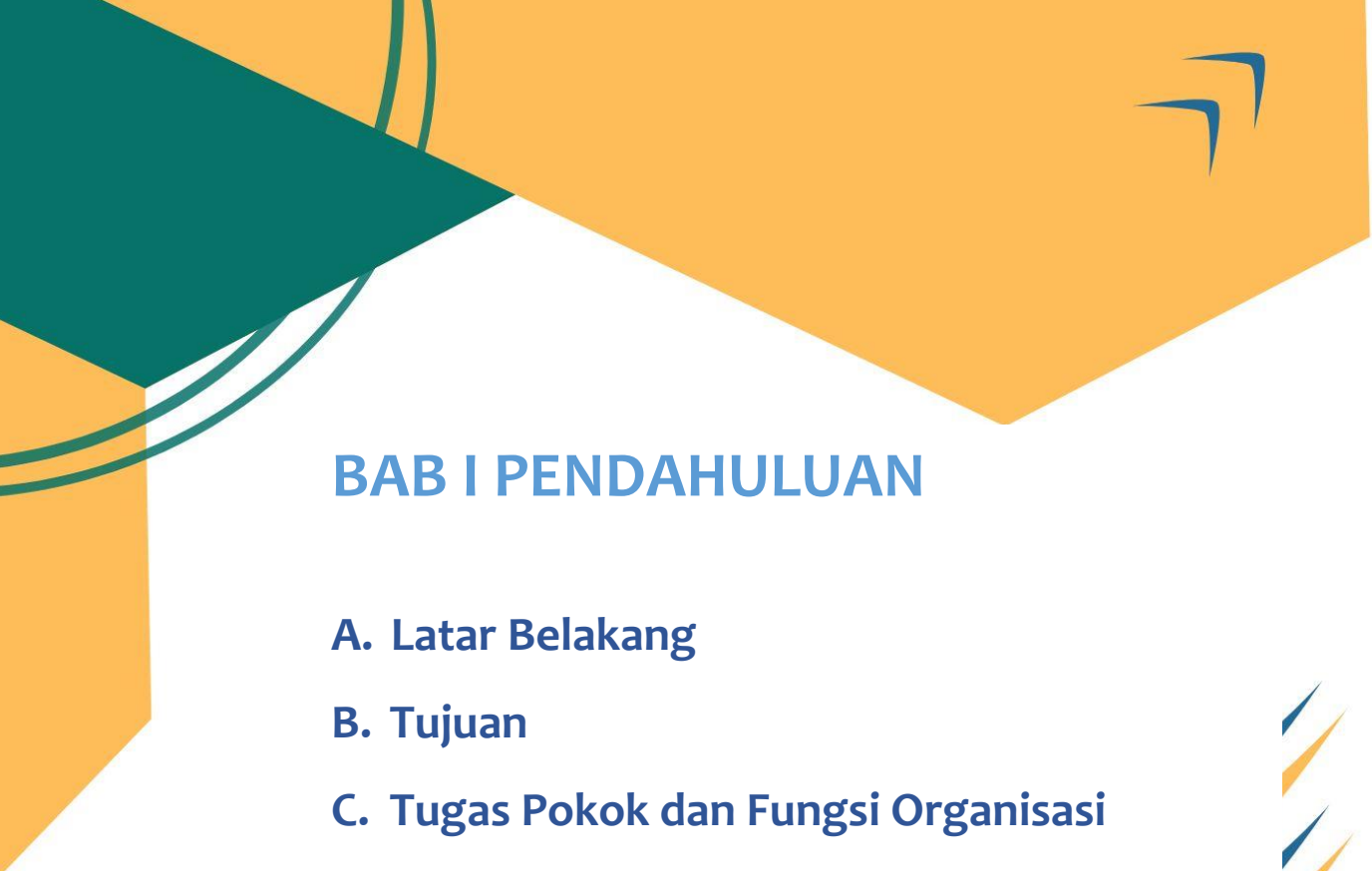
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan unit Eselon 2 yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Awal Tahun 2025 Pusluh KP telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang akan dicapai dalam Tahun 2025. Keenam sasaran kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2025 ini tercapai dengan baik dalam pencapaian progres kegiatan. Hasil Pengukuran capaian kinerja Pusluh KP dengan menggunakan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan indikator capaian kinerja Pusluh KP adalah Istimewa atau berwarna Biru dengan nilai **118,52%**. Secara rincian indikator kinerja yang telah tercapai pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. IKK 1 - Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh, tercapai sebanyak 24.273 Kelompok dari target 21.600 Kelompok (tercapai 112,38%);
2. IKK 2 - Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya, tercapai sebanyak 561 Kelompok dari target 435 Kelompok (tercapai 120%);
3. IKK 3 - Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk, tercapai sebanyak 1.997 Kelompok dari target 1.719 Kelompok (tercapai 116,17%);
4. IKK 4 - Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, tercapai sebanyak 1,25 Rupiah Milyar dari target 0,75 Rupiah Milyar (tercapai 120%);
5. IKK 5 - Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan, tercapai sebanyak 222 unit dari target 172 unit (tercapai 120%);
6. IKK 17 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, tercapai sebanyak 100% dari target 85% (tercapai 117,65%);

7. IKK 22 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, tercapai sebanyak 100% dari target 80% (tercapai 120%);

Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusluh KP Triwulan III Tahun 2025 per 30 September 2025 cukup baik yaitu mencapai Rp. 446.489.958.856,- atau 81,53% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 547.627.888.000,-.

Dalam proses pencapaian target kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan dalam mencapai capaian kinerja, namun pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target setiap indikator kinerja harus dilakukan secara berkala.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

D. Potensi dan Permasalahan

E. Keragaan Pegawai

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Penyuluhan KP merupakan satu unit Eselon II pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KP mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat Penyuluhan.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya pada akhir periode pengukuran.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat Penyuluhan KP sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Pusluh KP telah menetapkan rencana kerja Tahun 2025, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban Pusat Penyuluhan KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program penyuluhan dan SDM KP, sebagaimana tertuang dalam Renstra BPPSDM KP tahun 2025-2029.

Acuan dalam penyusunan LKj Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

B. Tujuan

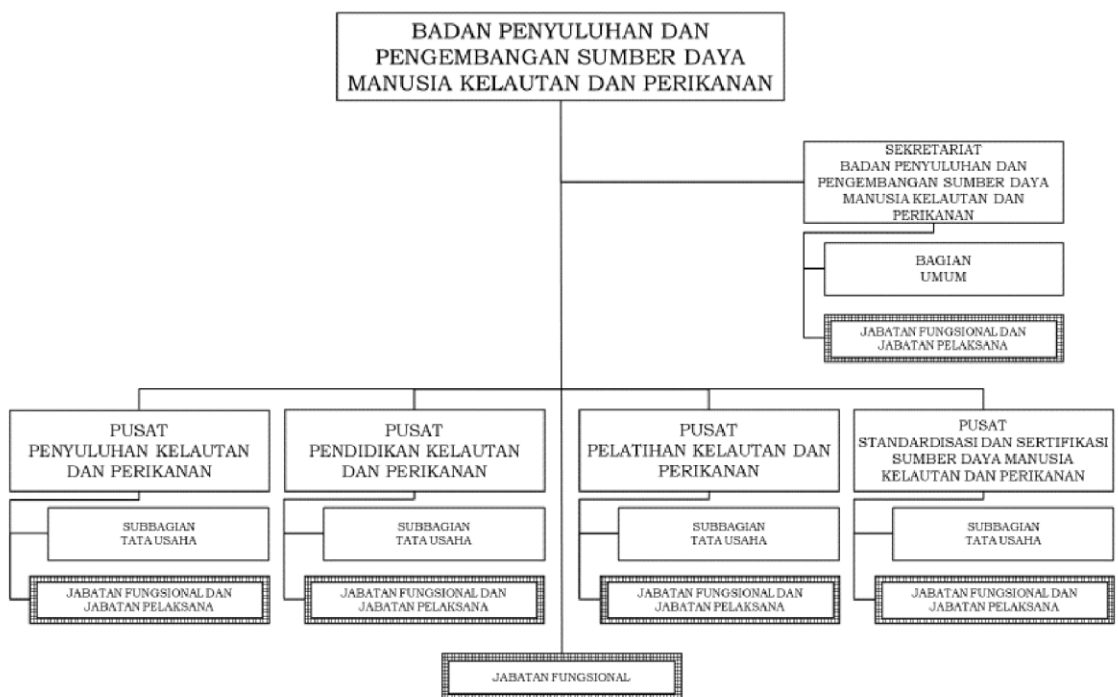
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Negara telah menetapkan target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut kemudian disusun dalam Laporan Kinerja Pusluh KP sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusluh KP Triwulan III Tahun 2025 ini, yaitu :

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III Tahun 2025 dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan

3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan pada tanggal 10 Februari 2025, susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; b. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; c. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; d. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; e. Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan f. kelompok jabatan fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan dan 12 fungsi.

TUGAS



penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan

FUNGSI

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
2. pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
3. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
4. pelaksanaan penilaian teknologi terekomendasi untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
5. pelaksanaan model pemberdayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
6. pelaksanaan fasilitasi penyusunan model percontohan untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
7. pelaksanaan model inkubasi bisnis untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
8. pelaksanaan fasilitasi pendampingan kelompok, gabungan kelompok, korporasi, dan/atau koperasi kelautan dan perikanan
9. koordinasi dan pengelolaan tenaga penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
10. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional penyuluhan kelautan dan perikanan
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan
12. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim

Kerja pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa memberi tugas kepada seluruh pegawai Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja serta memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi; menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yakni Surat Tugas Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor B.10/BPPSDM.2/KP.440/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor B.1557/BPPSDM.2/KP.440/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 karena adanya perubahan susunan Ketua Tim Kerja baru.

Dengan dilantiknya Pejabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Bulan Agustus 2025, maka dikeluarkan kembali Surat Tugas Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan nomor B.2312/BPPSDM.2/KP.440/IX/2025 pada tanggal tanggal 1 September 2025.



Gambar 2. Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pusat Penyuluhan KP

Masing-masing Tugas dan Fungsi Tim Kerja Pusat Penyuluhan KP secara rinci adalah sebagai berikut:

1. **Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan**, memiliki tugas dan fungsi:
 - a) melaksanakan perencanaan, persiapan, pembahasan, pengusulan, koordinasi, supervisi, kajian dan evaluasi atas kegiatan SFV;
 - b) melaksanakan identifikasi, pengumpulan, verifikasi dan penyusunan materi penyuluhan KP serta pembinaan pelaksanaan penyuluhan KP dan penyusunan Programa Penyuluhan KP Nasional Tahun 2026;

- c) melaksanakan identifikasi teknologi KP yang diterapkan untuk penyuluhan, melaksanakan penilaian dan pengusulan rekomendasi atas inovasi teknologi yang diterapkan, serta koordinasi, supervisi, kajian dan evaluasi penerapan teknologi untuk penyuluhan;
- d) melaksanakan pemetaan target kelompok yang akan diberikan percontohan penyuluhan, dan melaksanakan koordinasi dan supervisi bersama satker pelaksanaan percontohan serta melakukan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan percontohan penyuluhan;

2. Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan, memiliki tugas dan fungsi:

- a) melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri KP / Peraturan Kepala Badan tentang SKJ penyuluh, updating data base penyuluh secara periodik, melaksanakan koordinasi dengan satminkal dan Assessment Center untuk pendataan calon peserta satminkal, serta pemantauan target kinerja penyuluh sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) mengupdate data penyuluh perikanan swasta/swadaya secara periodik, dan melakukan pembinaan dan bimbingan peningkatan kompetensi dan kapasitas penyuluha perikanan;
- c) melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan yang akan mengikuti uji kompetensi/ sertifikasi, dan *updating* data penyuluh yang telah lulus kompetensi/sertifikasi;

3. Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan, memiliki tugas dan fungsi:

- a) melakukan pembinaan bagi penyuluh perikanan dalam pendampingan pembentukan kelompok (sosialisasi, supervisi dan tindaklanjut permasalahan pembentukan kelompok), berkoordinasi dengan UPT penyuluhan dalam rangka verifikasi data calon kelompok kelautan dan perikanan yang akan dibentuk, dan melakukan verifikasi dan validasi capaian dan kelengkapan dokumen pembentukan kelompok (KUSUKA, Berita Acara Pembentukan kelompok, dan/ atau Surat Pengesahan Pembentukan Kelompok), serta analisis dan evaluasi kinerja penyuluhan kelautan dan perikanan terkait pembentukan kelompok;
- b) melakukan pembinaan bagi penyuluh perikanan dalam pendampingan peningkatan kemampuan kelas kelompok (sosialisasi, supervisi dan tindaklanjut permasalahan peningkatan kemampuan

kelas kelompok kelompok), dan melakukan verifikasi dan validasi capaian dan kelengkapan dokumen kenaikan kelas kelompok per triwulan (Berita Acara penilaian kelas kemampuan kelompok dan/atau Rekomendasi peningkatan kelas kemampuan kelompok dan Piagam pengukuhan peningkatan kelas kemampuan kelompok), serta menyusun analisis dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kelas kelompok perikanan per tahun;

4. Tim Kerja Tata Kelola Penyuluhan, memiliki tugas dan fungsi:

- a) Melakukan identifikasi, koordinasi, supervisi, monitoring dan telaah atas kegiatan pemanfaatan atau kinerja yang menghasilkan PNBP lingkup pUsat Penyuluhan KP;
- b) menyusun dokumen kemitraan, reviu usulan kemitraan serta koordinasi, supervisi dan pemantauan atas pelaksanaan kemitraan lingkup Pusat Penyuluhan KP;
- c) menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan, serta menyusun naskah akademik dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan keluatan dan perikanan;
- d) melakukan koordinasi dan pengelolaan Aplikasi Digiliuh, PPID, Yanblik, media sosial, podcast dan penyusunan bahan publikasi/diseminasi lingkup Pusat Penyuluhan KP;

5. Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas dan fungsi:

- a) koordinasi dan pemantauan pengadaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sarana instalasi Penyuluhan KP;
- b) menyiapkan dokumen audit Itjen/ BPK dan TL rekomendasinya, pengelolaan Aplikasi SIDAK, menyusun Laporan SPIP/MR, mengelola persuratan/kearsipan dan *Whistle Blower System* (WBS);
- c) Pengendalian Revisi DIPA dan realisasi anggaran, penyusunan RPD, pengelolaan pembayaran kontraktual pengadaaan dan UP, TUP, serta pengelolaan aplikasi keuangan;

- d) koordinasi dan pelaksanaan kegiatan monev, penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Pusat Penyuluhan KP, pemenuhan dokumen SAKIP serta pengelolaan Aplikasi Monev;
- e) Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program (Renstra/Renja) dan kinerja, dokumen rencana kerja anggaran (RKA-KL) dan revisinya, serta pengelolaan aplikasi perencanaan;
- f) koordinasi dan pelayanan manajemen SDM lingkup Pusat Penyuluhan KP, koordinasi perencanaan pengembangan kompetensi ASN dan manajemen talenta, fasilitasi pelaksanaan magang/PKL dan pengelolaan aplikasi kepegawaian;
- g) penyusunan Rencana Umum Pengadaan, penyusunan HPS, spesifikasi teknis dan KAK Pengadaan Barang dan Jasa, SPK/kontrak dan SPPBJ;
- h) penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), usulan penetapan status penggunaan BMN, reklas asset, penghapusan BMN, Laporan BMN dan persediaan serta Pengelolaan Aplikasi BMN dan persediaan.

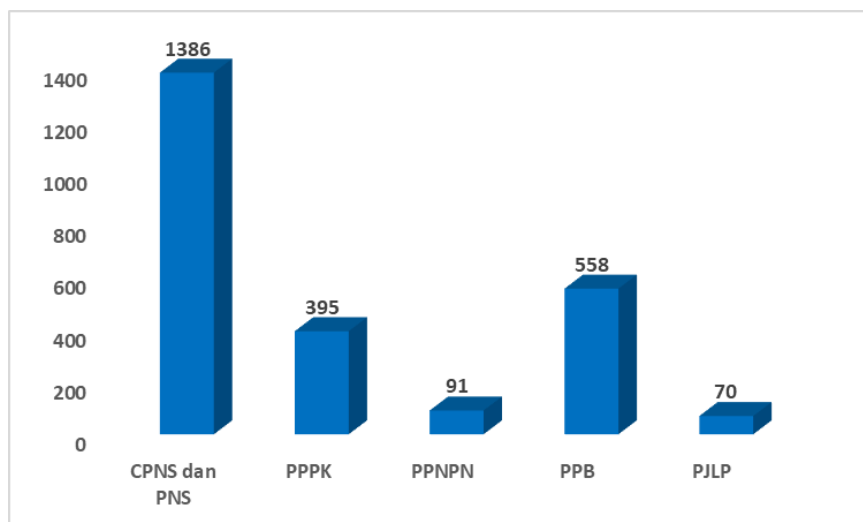
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis, yaitu Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol; Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang; Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros; dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor. Selain Unit Pelayanan Teknis diatas, ada beberapa unit kerja lainnya yang mempunyai fungsi penyuluhan kelautan dan perikanan. Beberapa Unit Pelayanan Teknis kerja lainnya yang juga melaksanakan program penyuluhan kelautan dan perikanan antara lain Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon; dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung.

D. Keragaan Pegawai

Pada Triwulan III 2025 terdapat perubahan SDM pegawai ASN lingkup Pusat Penyuluhan KP, karena adanya Pegawai yang mutasi ke K/L Lainnya, memasuki masa Purna Bakti/pensiun dan meninggal dunia, sehingga komposisi pegawai lingkup Pusat Penyuluhan KP pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 2.500 orang pegawai, dengan jumlah PNS sebanyak 1.389 orang, PPPK sebanyak 395 orang, Non PNS (PPNPN, PPB, PJLP) sebanyak 719 orang.

Tabel 1 Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025

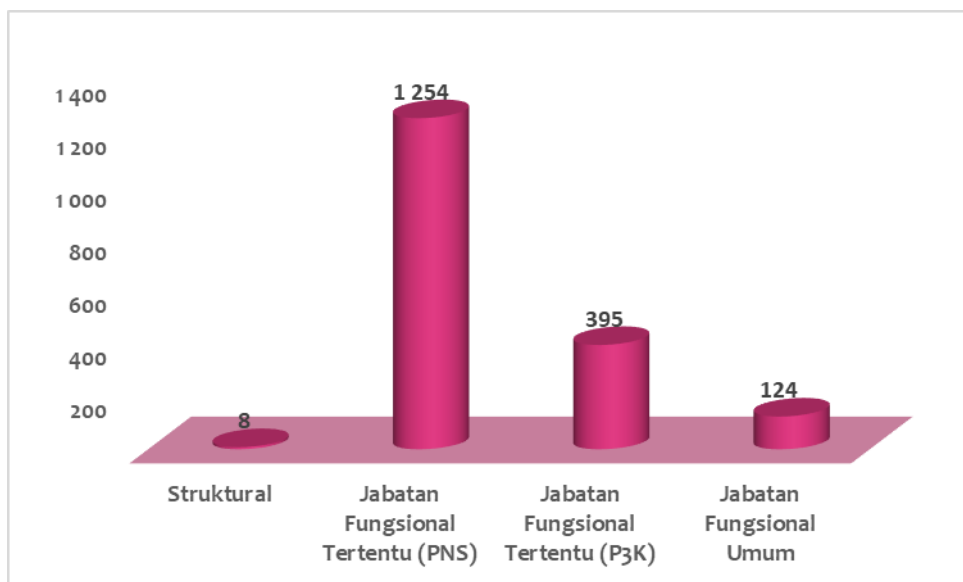
SATKER	CPNS dan PNS	PPPK	NON PNS	JUMLAH
Pusat Penyuluhan KP	44	0	37	81
BBRBLPP Gondol	262	57	161	480
BRPPUPP Palembang	323	92	122	537
BRPBAPPP Maros	415	75	174	664
BRPBATPP Bogor	342	171	225	738
JUMLAH	1.386	395	719	2.500



Gambar 3. Distribusi Status Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025

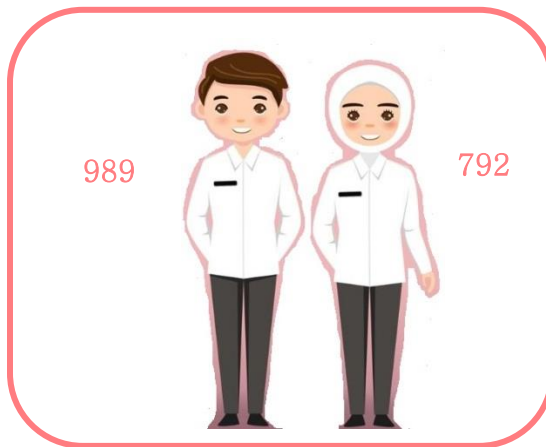
Persentase pegawai CPNS dan PNS merupakan yang paling banyak yakni 55,44% dilanjutkan dengan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebesar 22,32%, PPPK sebesar 15,80%, Tenaga Kontrak (PPNP) sebesar 3,64% dan PJLP sebesar 2,80%.

Dari jumlah ASN pegawai berstatus CPNS, PNS dan PPPK yang ada di lingkup Pusluh KP sebanyak 1.781 orang diperoleh komposisi jumlah pegawai Struktural sebanyak 8 orang atau 0,45%, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) PNS sebanyak 1.254 orang atau 70,41%, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) PPPK sebanyak 395 orang atau 22,18% dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 124 orang atau 6,96%.

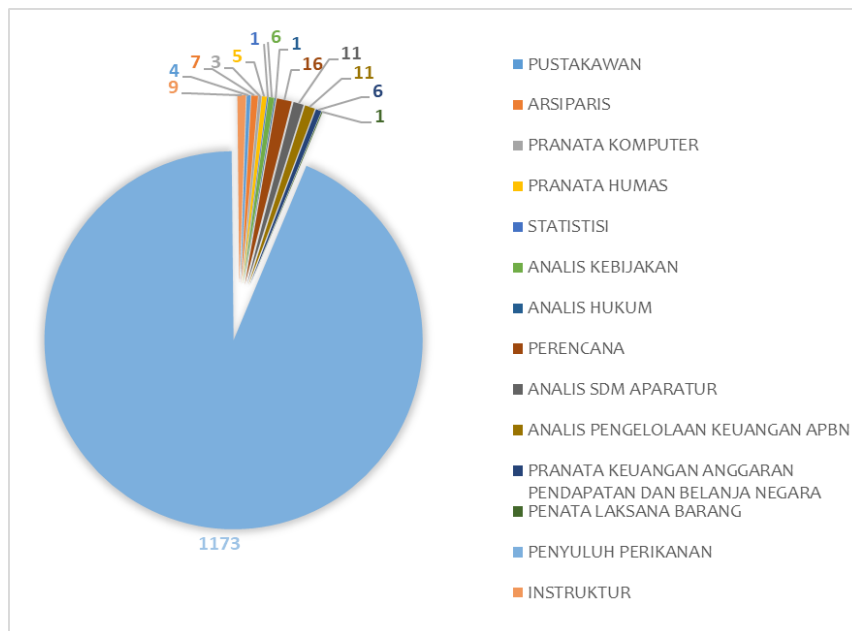


Gambar 4 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup Pusluh KP

Sedangkan jumlah pegawai CPNS, PNS dan PPPK berdasarkan gender dapat dilihat bahwa pegawai di lingkup Pusluh KP secara umum, proporsi jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan, dengan persentase pegawai laki-laki sebesar 55,53% dan pegawai Perempuan sebesar 44,47%.

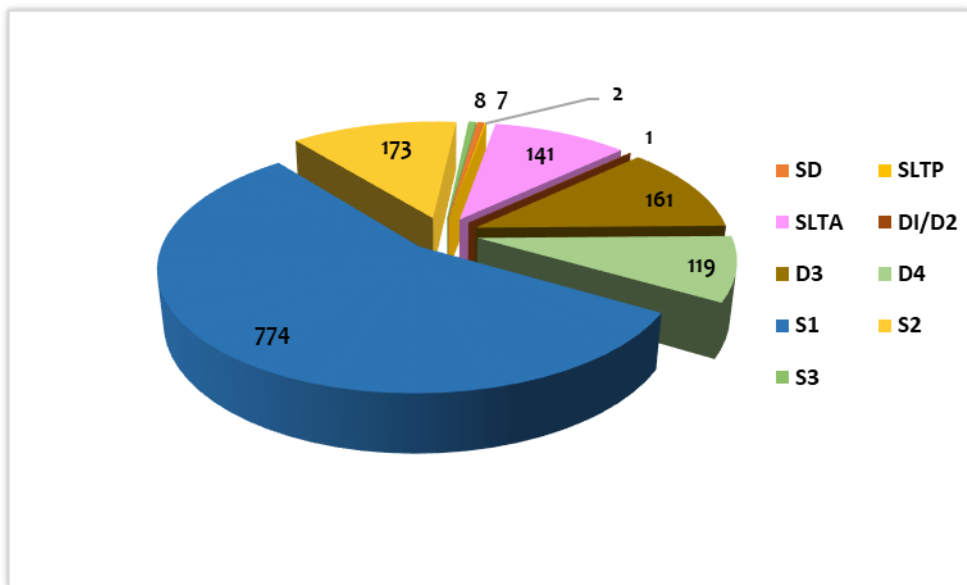


Gambar 5 Persentase Jumlah Pegawai Lingkup Pusluh KP berdasarkan Gender



Gambar 6 Sebaran Kelas Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pusluh KP

Dapat dilihat pada Gambar diatas terdapat 14 (empat belas) jabatan fungsional tertentu yang diemban oleh pegawai di lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Dengan jumlah jabatan fungsional terbanyak adalah Penyuluh Perikanan.



Gambar 7 Diagram Sebaran PNS menurut Tingkat Pendidikan Lingkup Pusluh KP

Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, dari data per 30 September 2025, menurut tingkat pendidikan: S3 sebanyak 8 orang, S2 sebanyak 173 orang, S1 sebanyak 774 orang, D4 sebanyak 119 orang, D3 sebanyak 161 orang, D1/D2 sebanyak 1 orang dan ≤ SMA sebanyak 153 orang, sisanya adalah Pegawai PPPK dengan jumlah 395 orang.

Tabel 2 Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja dan pendidikan Per 30 September 2025

Satuan: Orang

No	Unit Kerja	Pendidikan CPNS dan PNS									Jumlah	Pendidikan PPPK S2/S1/D4/D3	Jumlah CPNS, PNS dan PPPK
		SD	SLTP	SLTA	DI/D2	D3	D4	S1	S2	S3			
1	Pusat Penyuluhan KP			11		4	1	12	14	2	44		44
2	BBRBLPP Gondol Bali	4		48		19	14	163	14		262	57	319
3	BRPBATPP Bogor	1	1	28		58	42	170	38	4	342	171	513
4	BRPPUPP Palembang	2	1	18	1	44	46	160	50	1	323	92	415
5	BRPBAP3 Maros			36		36	16	269	57	1	415	75	490
Jumlah		7	2	141	1	161	119	774	173	8	1.386	395	1.781

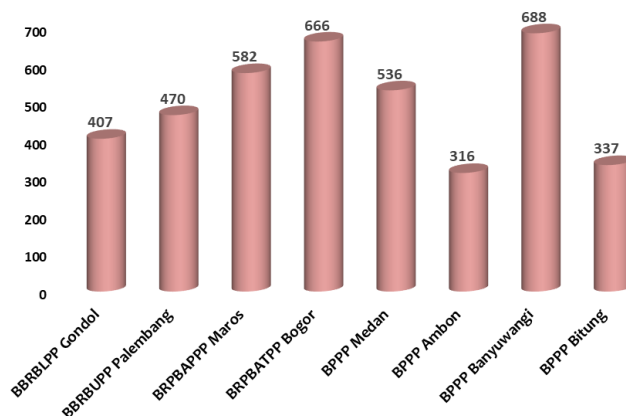
Sebagai upaya dalam meningkatkan jenjang pendidikan pegawai Lingkup Pusluh KP maka dilaksanakan tugas belajar bagi ASN Lingkup Pusluh KP. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

Data jumlah Penyuluh Perikanan lingkup UPT/Satminkal Pusat Penyuluhan KP per September 2025 terdapat sebanyak 4.002 orang dengan sebaran Penyuluh di tiap Provinsi pada Satker/Satminkal lingkup Penyuluhan KP per 30 September 2025 sebagaimana pada Tabel 3 dan Gambar 8 berikut:

Tabel 3 Sebaran Penyuluh di Provinsi pada Satker/Satminkal lingkup Penyuluhan KP

No	SATKER	PROVINSI	ASN dan PPB	No	SATKER	PROVINSI	ASN dan PPB
1	BBRBLPP Gondol	BALI	4	5	BPPP Medan	ACEH	172
		NTB	9			SUMATERA UTARA	115
		NTT	4			SUMATERA BARAT	132
		KALIMANTAN TENGAH	131			RIAU	88
2	BBRBUPP Palembang	JAMBI	70			KEP. RIAU	29
		SUMATERA SELATAN	159	6	BPPP Ambon	MALUKU	1
		BENGKULU	99			MALUKU UTARA	2
		LAMPUNG	97			PAPUA BARAT	32
		BANGKA BELITUNG	45			PAPUA BARAT DAYA	60
3	BRPBAPPP Maros	SULAWESI SELATAN	367			PAPUA	7
		SULAWESI TENGGARA	160			PAPUA TENGAH	0
		SULAWESI BARAT	55			PAPUA SELATAN	5
4	BRPBATPP Bogor	BANTEN	40	7	BPPP Banyuwangi	PAPUA PEGUNUNGAN	0
		DKI JAKARTA	18			JAWA TIMUR	397
		JAWA BARAT	250			KALIMANTAN SELATAN	142
		JAWA TENGAH	315			KALIMANTAN BARAT	101
		DIY	43	8	BPPP Bitung	KALIMANTAN TIMUR	48
						KALIMANTAN UTARA	46
						SULAWESI UTARA	109
						SULAWESI TENGAH	110
						GORONTALO	72

Sebaran Penyuluh Perikanan Satker/Satminkal
Lingkup Pusluh KP (per 30 Sep 2025)



Gambar 8 Sebaran Penyuluh Perikanan Lingkup UPT/Satminkal Penyuluhan KP (data per 30 September 2025)



Gambar 9 Sebaran penyuluh kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia

E. Potensi dan Permasalahan

Penyuluhan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan teknologi, serta mendorong keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk memberdayakan pelaku usaha, seperti nelayan dan pembudidaya ikan agar lebih produktif dan mandiri. Potensi yang dimiliki oleh penyuluhan KP, antara lain: Peningkatan Kapasitas SDM, Pengembangan Teknologi dan Inovasi, Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan, Penguatan Kelembagaan dan Ekonomi Berbasis Masyarakat, Mendukung Konservasi dan Keberlanjutan Sumber Daya Laut, Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Generasi Muda.

Namun, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya Keterbatasan Tenaga Penyuluh dan Kompetensinya, Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat, Kurangnya Sinkronisasi antara Pemerintah, Akademisi dan Pelaku Usaha, Minimnya Pemanfaatan Teknologi, Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana pendukung penyuluhan, Kurangnya Program Berkelanjutan dan Evaluasi Penyuluhan.

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2025

Sistem Penyajian Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban yang dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mengenai keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini berisi pertanggungjawaban kinerja Pusat Penyuluhan KP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*Performance Results*) Triwulan III Tahun 2025 sendiri dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana dan atau penetapan kinerja (komitmen kinerja) yang telah dilakukan akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan membandingkan hasil. Demikian pula akan disajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta

peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan selama Tahun berjalan, selain juga melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dalam mengaitkan dengan anggaran maka, realisasinya akan digunakan untuk membahas perwujudan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan III Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Pusat Penyuluhan KP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusat Penyuluhan KP.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhan KP 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Rencana Kerja Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

D. Pengukuran Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan menyangkut dengan persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk

urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Visi Pusat Penyuluhan KP mendukung Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, Pusat Penyuluhan KP melaksanakan misi BPPSDMKP, yakni melaksanakan **2 dari 8 Misi/Asta Cita** yang dirumuskan sebagai berikut:

“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPSDM KP, maka Pusat Penyuluhan KP merumuskan tujuan yang ingin dicapai selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan
2. Peningkatan relevansi dan perluasan akses perguruan tinggi
3. Pengembangan inovasi pembelajaran
4. Program prioritas makan bergizi gratis

Arah Kebijakan

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan tersebut merupakan program presiden terpilih dan arah pembangunan jangka panjang nasional.

Sasaran utama pembangunan nasional ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Target yang akan dicapai pada tahun 2029 adalah 1) Pendapatan per kapita setara negara maju, 2) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, 3) Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat, 4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, 5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Tahun 2025-2029 merupakan pentahapan pertama dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Tahap pertama RPJPN bertujuan untuk membentuk penguatan transformasi. Pada tahap pertama ini, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, pencapaian target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, dan peta jalan Ekonomi Biru maka kerangka pikir pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan mindset pembangunan sektor kelautan perikanan dari pembangunan berorientasi produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur yang mempertimbangkan daya dukung dan berorientasi pasar dengan menempatkan ekologi sebagai panglima untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional 2025-2029. Maka arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah Perluasan kawasan konservasi perairan, Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, Pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan tawar (darat) yang ramah lingkungan, Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, Pembersihan sampah plastik laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029, BPPSDM melakukan transformasi dibidang penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa target visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dapat tercapai dengan baik melalui penyelenggaraan Transformasi Penyuluhan. Transformasi penyuluhan merupakan bagian integral dari arah

kebijakan pengembangan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan, dengan fokus pada peningkatan efektivitas dan relevansi penyuluhan terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Arah kebijakan dalam rangka transformasi penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi penyuluh secara berkelanjutan melalui jalur pendidikan formal, pelatihan terstruktur dan program magang;
2. Penataan penyuluh sesuai dengan potensi SDA kelautan dan perikanan, sebaran pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan serta program prioritas KKP dan kementerian/ lembaga lainnya;
3. Pembaruan regulasi terkait penyuluhan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini;
4. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi internasional terkait ketertelusuran produk-produk kelautan dan perikanan;
5. Penumbuhan kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang akan menjadi target pendampingan penyuluhan;
6. Pembentukan kelembagaan penyuluh swasta dan swadaya untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
7. Modernisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan;
8. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi, sistem informasi penyelenggaraan penyuluhan dan sistem ketertelusuran terintegrasi untuk produk kelautan dan perikanan;
9. Pembentukan kemitraan atau bentuk kerja sama lainnya antara KKP dengan pemerintah daerah, kementerian/ lembaga lainnya, non-government organization (NGO) dan pihak swasta untuk penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Peningkatan fungsi koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kementerian/ lembaga lainnya, NGO dan pihak swasta.

Sasaran

Sasaran Strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada **SS-4 “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten”**. Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah:

- SP-1** Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- SP-2** Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat
- SP-3** Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- SP-4** Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP

Sedangkan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sendiri memiliki Sasaran Kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2025 mengacu pada Sasaran Program BPPSDM yang diturunkan dari Sasaran Strategis KKP yaitu :

- | | |
|-------------|--|
| SK-1 | Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan |
| SK-2 | Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan |
| SK-3 | Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) di Lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan |
| SK-4 | Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan |
| SK-5 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan |
| SK-6 | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan |

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Pusat Penyuluhan KP Tahun Anggaran 2025 menetapkan 2 (dua) kegiatan, yakni Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang terdapat pada seluruh unit kerja dilingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, disajikan pada Tabel 4.

Pada April 2025 terdapat revisi pagu anggaran disebabkan adanya penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan honor Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebesar Rp. 1.612.757.000,-. Pada September 2025 terdapat revisi pagu anggaran karena adanya penghapusan blokir sebesar Rp. 9,157,964,000,- sehingga pagu anggaran revisi dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah.

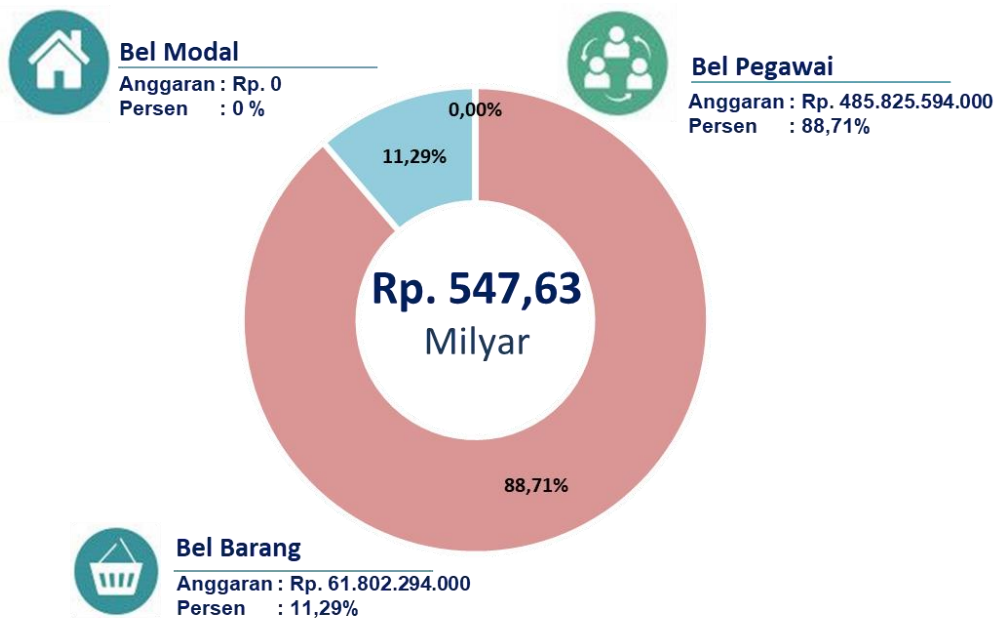
Tabel 4 Revisi Rencana Kerja Pusat Penyuluhan KP TA 2025

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN Revisi April (Rp.)	PAGU ANGGARAN Revisi September (Rp.)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	537.725.594.000	537.725.594.000	516,723,726,000
2	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	30.291.405.000	30.904.162.000	30.904.162.000
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		568.016.999.000	569.629.756.000	547.627.888.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BPPSDMKP. Penetapan kinerja Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025 atau Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK tersebut merupakan salah satu Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program dari indikator tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan tersebut diatas yang terdapat pada seluruh unit kerja dilingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan rincian anggaran pada Tabel 5.

Tabel 5 Anggaran unit kerja dilingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

NO	SATKER	PAGU ANGGARAN Awal (Rp.)	PAGU ANGGARAN Revisi April (Rp.)	PAGU ANGGARAN Revisi September (Rp.)
1	Pusat Penyuluhan KP	34.009.510.000	34.009.510.000	24.851.546.000
2	BBRBL-PP Gondol	64.365.118.000	64.514.898.000	60.532.775.000
3	BRPPUP-PP Palembang	75.788.129.000	75.257.376.000	73.228.299.000
4	BRPBAP-PP Maros	97.737.294.000	97.096.937.000	92.498.523.000
5	BRPBAT-PP Bogor	86.107.571.000	87.108.901.000	85.010.800.000
6	BPPP-Medan	53.693.053.000	55.479.594.000	55.479.594.000
7	BPPP-Ambon	38.211.915.000	37.388.277.000	37.443.646.000
8	BPPP-Banyuwangi	80.522.819.000	81.173.624.000	81.157.478.000
9	BPPP-Tegal	48.800.000	48.800.000	48.800.000
10	BPPP-Bitung	37.532.790.000	37.551.839.000	37.376.427.000
TOTAL		568.016.999.000	569.629.756.000.00	547.627.888.000



Gambar 10. Komposisi anggaran Lingkup Penyuluhan KP

Berdasarkan postur anggaran Lingkup Penyuluhan KP terlihat bahwa jenis belanja terbesar dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar 88,71%, sedangkan anggaran Belanja Barang dan anggaran Belanja Modal masing-masing sebesar 11,29% dan 0%. Tidak terdapat adanya anggaran modal karena adanya efisiensi anggaran.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Pusat Penyuluhan KP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Pusat Penyuluhan KP dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 6 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai dengan 23 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sebagai alat ukur pencapaian, target 23 (dua puluh tiga) IKK Pusat Penyuluhan KP yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun Anggaran 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)	35.000
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	1.157
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)	4.100
		4	Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	2,3649
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)	300
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)	1
		7	Materi/Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6
		8	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	3
3	Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Desa)	1
4	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	10	Penyuluh Perikanan yang Kompeten (Orang)	50
		11	Persentase Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (%)	2
		12	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Disusun (NSPK)	4
		13	Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	1
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan (Unit)	1
		15	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	16	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	85
		18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82

		20	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,5
		21	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
		22	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat revisi PK Pusat Penyuluhan KP sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7 Revisi Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun Anggaran 2025

No.	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
	Revisi I		
1.	Anggaran Pusat bertambah dikarenakan adanya penambahan honor PPB pada Juni 2025	568,016,999,000	569,629,756,000
2.	Bulan Penandatanganan PK	24 Januari 2025	26 Juni 2025

D. Pengukuran Kinerja

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK. Status capaian yang ditunjukkan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antara capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK, terdiri dari Outcome, Output Kendali Rendah, Output Kendali Tinggi, dengan bobot seperti Tabel 8.

Tabel 8 Bobot validasi IKK

No	Validitas IKU	Bobot
1	Outcome	5
2	Output Kendali Rendah	3
3	Output Kendali Tinggi	2

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas Output Kendali Rendah yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja. Pola Perhitungan terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menepakati standar status kinerja untuk nilai kinerja dengan klasifikasi polarisasi. Polarisasi terdiri dari *Maximize*, *Minimize*, atau *Stabilize*. *Maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk. *Minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk. *Stabilize* yaitu semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Berikut klasifikasi polarisasi yang ditentukan sesuai Tabel 9.

Tabel 9 Klasifikasi target indikator kinerja

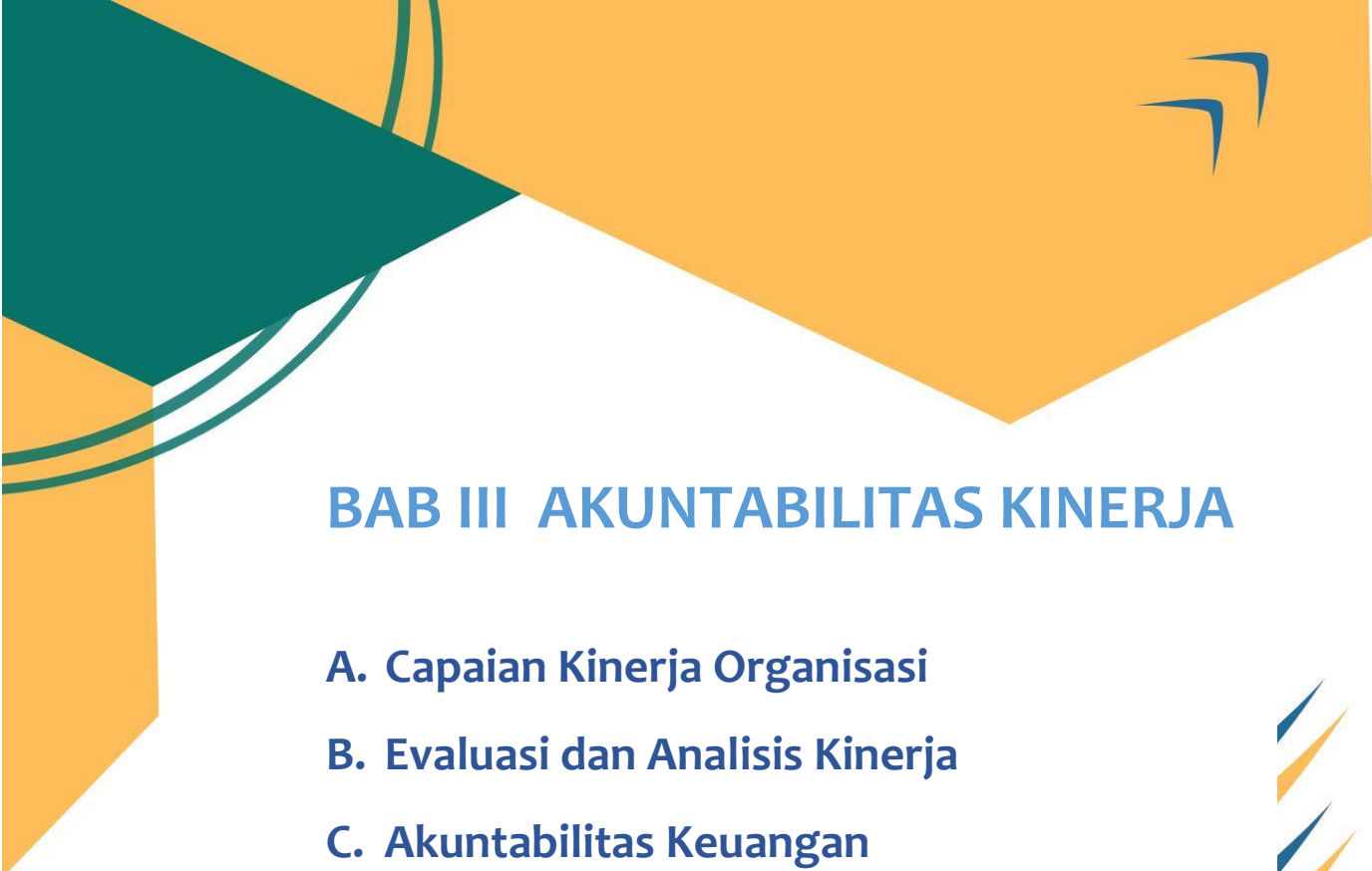
KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Sangat Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Status capaian nilai kinerja ditentukan oleh nilai indeks pada Tabel 10.

Tabel 10 Status Capaian Nilai Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110-120
Baik	Nilai 90-<110
Cukup	Nilai 70-<90
Kurang	Nilai 50-<70
Sangat Kurang	Untuk Nilai <50
Belum Ada Penilaian	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan



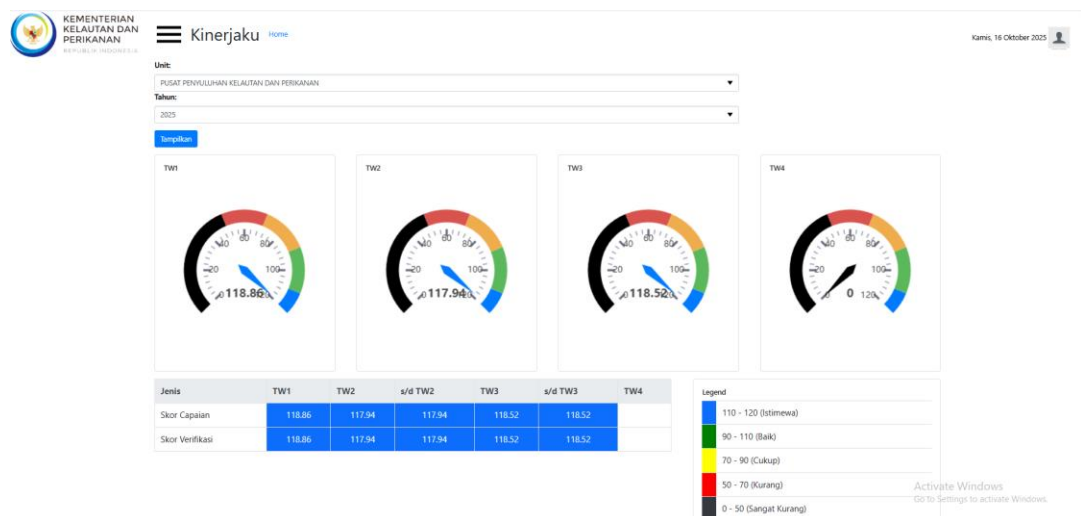
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2025 Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) mendapatkan mandat untuk melaksanakan 6 (enam) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Nilai pencapaian kinerja Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan III Tahun 2025 didapat dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id*.

Hasil Pengukuran capaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) dengan menggunakan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* menunjukkan capaian Triwulan III Tahun 2025 memiliki kinerja Istimewa (di atas target yang telah ditetapkan) yang ditandai berwarna Biru dengan nilai 118,52%.



Gambar 11 Nilai NKO Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Aplikasi Kinerjaku Triwulan III Tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusat Penyuluhan KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Capaian IKK Pusluh KP

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025 dapat tercapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11 Capaian IKK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)	35.000	21.600	24.273	112,38
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	1.157	435	561	120 (128,97)
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)	4.100	1.719	1.997	116,17
		4	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	2,364	0,75	1,25	120 (166,67)
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)	300	172	222	120 (129,07)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	%
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)	1	-	-	-
		7	Materi/Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6	-	-	-
		8	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	3	-	-	-
3	Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Desa)	1	-	-	-
4	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	10	Penyuluh Perikanan yang Kompeten (Orang)	50	-	-	-
		11	Persentase Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (%)	2	-	-	-
		12	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Disusun (NSPK)	4	-	-	-
		13	Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	1	-	-	-
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan (Unit)	1	-	-	-
		15	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	-	-	-
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	16	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5	-	-	-
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	85	85	100	120 (117,65)
		18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92	-	-	-
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82	-	-	-
		20	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,5	-	-	-
		21	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	-	-	-
		22	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80	80	100	120 (125)
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80	-	-	-

SASARAN KEGIATAN 1**Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan beberapa indikator yang ditargetkan di Triwulan III Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA 1**Kelompok Pelaku Usaha /Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)**

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh dan dibentuk pada tahun sebelumnya oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses modal, pendampingan akses perizinan berusaha dan pendampingan manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDMKP/ Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Contoh Kode Registrasi Kelompok : 2.1.12.05.0109.0214

- 2 : Menjelaskan Kelas Kelompok (Pemula, Lanjut, Madya, Utama)
- 1 : Menjelaskan Jenis Usaha Kelompok (Budidaya, Penangkapan, Pengolahan/Pemasaran, Garam, Wisata Bahari, Pengawasan, dan Konservasi)
- 12 : Menjelaskan lokasi Provinsi (Provinsi)
- 5 : menjelaskan lokasi Kabupaten/Kota (d disesuaikan dengan kodifikasi pada masing-masing wilayah)
- 0109 : bulan dan tahun terbentuk
- 0214 : bulan dan tahun dikukuhkan

Indikator kinerja ini diperoleh dari Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.

Pada Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025 ditetapkan target 35.000 kelompok. Capaian Triwulan III Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh tersaji pada Tabel 12.

Tabel 12 Capaian IKK 1-Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)

IKK 1-Kelompok Pelaku Usaha /Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)											
Realisasi TW III				Tahun 2025				%	Renja Pusluh KP		
2021*	2022*	2023*	2024	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	Kenaikan TW III 2024-2025	Target 2025	% Capaian thdp Target Renja 2025	
43.303	36.144	36.911	38.060	35.000	21.600	24.273	112,38%	-36,22	35.000	69,35%	

*Capaian 2021-2023 (Puslatluh)

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini, IKK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok) telah tercapai sebanyak 24.273 kelompok dari target sebesar 21.600 kelompok atau terealisasi 112,38%.

Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 36.22% disebabkan karena adanya penyesuaian dari Kepmen KP No.14 Tahun 2012 ke Permen KP No. 28 Tahun 2024 sehingga mengakibatkan penurunan target dan juga karena adanya pemberlakuan efisisensi anggaran diseluruh kegiatan. Apabila dibandingkan dengan target Renja Pusluh KP 2025 telah tercapai sebesar 69,35% dari target 35.000 kelompok.

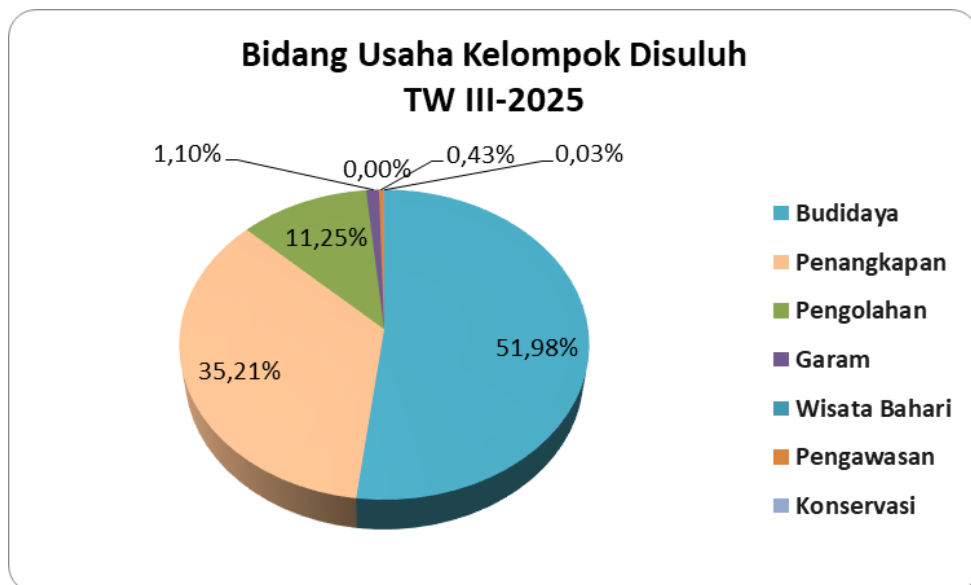
Rincian capaian Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh pada UPT Pusat Penyuluhan KP dan Satminkal Penyuluhan KP sesuai Nota Dinas Kepala Pusat Penyuluhan KP kepada Kepala BPPSDM KP Nomor 727/BPPSDM.2/RC.610/X/2025 perihal Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Utama Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian capaian Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh

No.	UPT/ Satminkal	Budidaya	Penangkapan	Pengolahan /Pemasaran	Garam	Wisata Bahari	Pengawasan	Konservasi	Jumlah
1	BBRBLPP Gondol	1.590	1.497	438	56	-	19	-	1.800
2	BRPPUPP Palembang	1.298	397	298	-	-	6	1	825
3	BRPBAPPP Maros	1.990	1.377	265	17	-	1	-	1.800
4	BRPBATPP Bogor	1.910	484	417	32	-	31	1	1.100

No.	UPT/ Satminkal	Budidaya	Penang- kapan	Pengolahan /Pemasaran	Garam	Wisata Bahari	Pengawa- san	Konserva- si	Jumlah
5	BPPP Medan	2.066	1.177	242	50	-	9	-	1.938
6	BPPP Ambon	364	1.396	282	-	-	7	1	1.100
7	BPPP Banyuwangi	2.816	1.399	651	104	-	26	4	1.900
8	BPPP Tegal	16	10	24	-	-	-	-	50
9	BPPP Bitung	568	809	114	7	-	5	1	320
	Total	12.618	8.546	2.731	266	-	104	8	24.273

Jenis bidang usaha yang disuluh meliputi usaha budidaya, penangkapan, pengolahan/pemasaran, garam, wisata bahari, pengawasan dan konservasi dengan bidang yang paling banyak disuluh adalah bidang usaha budidaya sebanyak 12.618 kelompok atau 51,98%, paling sedikit adalah bidang Konservasi sebanyak 8 kelompok atau 0,03%. Terdapat bidang usaha yang belum terdapat kegiatan penyuluhan, yakni bidang wisata bahari, sebagaimana rincian pada masing-masing bidang usaha berikut:



Gambar 12. Sebaran bidang usaha kelompok disuluh Triwulan III Tahun 2025

Faktor keberhasilan indikator kinerja ini didukung dari kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten, menguasai ilmu-ilmu baru, inovatif, terampil, solutif, serta mampu membimbing kelompok yang disuluh. Selain itu, terbitnya

peraturan Kepala BRSDM KP No.60 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan PPPK, Penyuluh Perikanan Bantu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh.

Kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan Pusluh KP dengan *instrument* monitoring dari perjanjian kinerja, manual iku, pelaporan *online* penyuluh perikanan, verifikasi, validasi dan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan penyuluhan. Didukung juga dengan monitoring setiap SATMINKAL terhadap penyuluh perikanan dalam melakukan penyusunan profil kelompok maupun pembaharuan data profil kelompok sebagai data dukung kinerjanya yang juga mendukung penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) penyuluh perikanan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 21.042.786.833,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 18.903.370.174,- (89,83%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha /pelaku pendukung KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP No. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Pada Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025 ditetapkan target 1.157 kelompok. Capaian Triwulan III Kelompok pelaku usaha /pelaku pendukung KP yang Ditingkatkan Kelasnya tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14 Capaian IKK 2-Kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)

IKK 2-Kelompok Pelaku Usaha /Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)										
Realisasi TW III				Tahun 2025				%	Renja Pusluh KP	
2021*	2022*	2023*	2024	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III		Target 2025	% Capaian thdp Target Renja 2025
551	803	1.1127	1.183	1.157	435	561	120%	-52,58	1.157	48,7%

*Capaian 2021-2023 (Puslatluh)

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini, IKK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya telah tercapai sebanyak 561 kelompok dari target sebesar 435 kelompok atau terealisasi 128,97%, namun karena nilai maksimal pada Aplikasi Kinerjaku adalah 120% maka persentase capaian IKK ini adalah 120%.

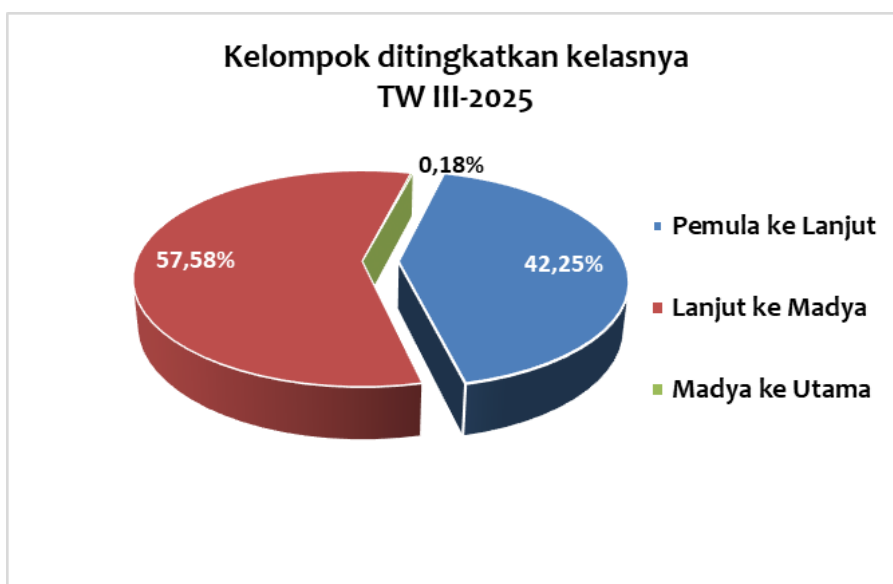
Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 52,58% disebabkan adanya penyesuaian dari Kepmen KP No.14 Tahun 2012 ke Permen KP No. 28 Tahun 2024 sehingga mengakibatkan penurunan target dan juga karena adanya pemberlakuan efisisensi anggaran diseluruh kegiatan. Apabila dibandingkan dengan target Renja Pusluh KP 2025 telah tercapai sebesar 48,57% dari target 1.157 kelompok.

Rincian capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya pada UPT Pusat Penyuluhan KP dan Satminkal Penyuluhan KP berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Penyuluhan KP kepada Kepala BPPSDM Nomor 728/BPPSDM.2/RC.610/X/2025 perihal Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Utama Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Triwulan III Tahun 2025 tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15 Rincian capaian Kelompok Pelaku usaha/pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya

No	UPT/Satminkal	Pemula ke Lanjut	Lanjut ke Madya	Madya ke Utama	Total
1	BBRBLPP Gondol	23	37	-	60
2	BRPPUPP Palembang	3	9	-	12
3	BRPBAPPP Maros	20	20	-	40
4	BRPBATPP Bogor	40	50	-	90
5	BPPPP Medan	84	-	-	84
6	BPPPP Ambon	20	-	-	20
7	BPPPP Banyuwangi	19	180	1	200
8	BPPPP Tegal	-		-	-
9	BPPPP Bitung	28	27	-	55
	Total	237	323	1	561

Pada Triwulan I terdapat hanya 1 peningkatan kelas kelompok dari kelas Madya ke kelas Utama, hal ini disebabkan masih dilakukannya proses penyesuaian peningkatan kelas kelompok sesuai Permen KP No. 28 Tahun 2024. Peningkatan kelompok merupakan hasil penilaian Tim Penilai tingkat Kabupaten atau Kota dengan melakukan kegiatan perencanaan. Sesuai Permen KP No.28 Tahun 2024 terdapat penambahan kelas kelompok, semula terdiri dari 3 kelas kelompok, (Pemula, Madya, dan Utama) menjadi 4 kelas kelompok (Pemula, Lanjut, Madya dan Utama). Sehingga dilakukan penyesuaian kelas kelompok dengan ketentuan nilai skoring ≤ 250 tetap dikelas Pemula, nilai 250 - 350 kelas Lanjut, nilai 350 - 650 kelas Madya, dan nilai 650 - 1000 kelas Utama.



Gambar 13. Persentase kelompok ditingkatkan kelasnya Triwulan III Tahun 2025

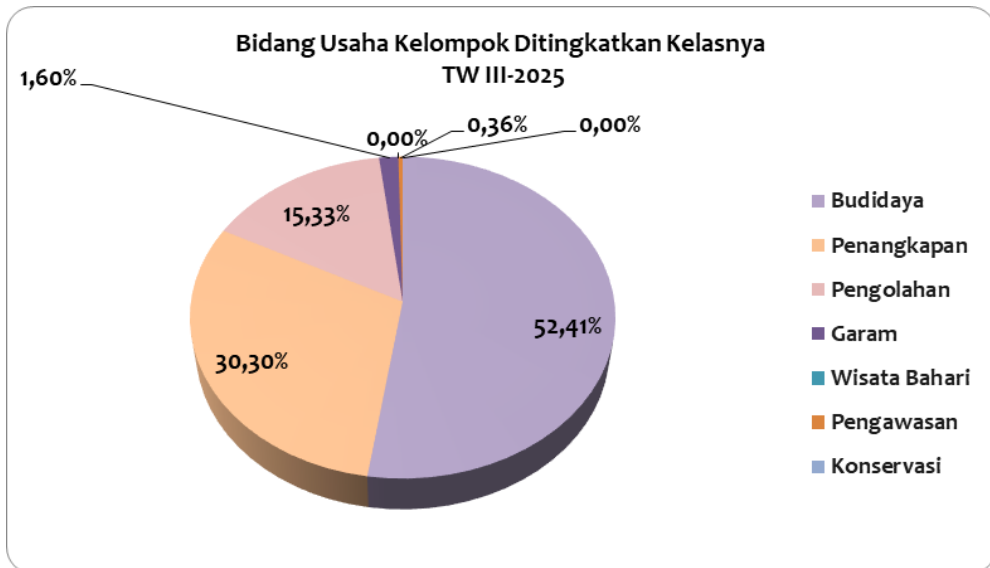
Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat peningkatan kelas dari Kelas Pemula ke Lanjut sebesar 42,25%, peningkatan kelas dari Kelas Lanjut ke Madya sebesar 57,58%, dan peningkatan kelas dari Kelas Madya ke Utama sebesar 0,18%.

Tabel 16 Rincian Peningkatan kelas kelompok berdasarkan bidang usaha

No	Saminkal	Budidaya	Penang kapan	Pengolahan /Pemasaran	Garam	Wisata Bahari	Pengawas an	Konserv asi	Grand Total
1	BBRBLPP Gondol	24	21	10	4	-	1	-	60
2	BRPPUPP Palembang	7	2	3	-	-	-	-	12
3	BRPBAPPP Maros	26	11	3	-	-	-	-	40
4	BRPBATPP Bogor	57	17	16	-	-	-	-	90
5	BPPP Medan	43	32	9	-	-	-	-	84
6	BPPP Ambon	3	8	9	-	-	-	-	20
7	BPPP Banyuwangi	114	52	28	5	-	1	-	200
8	BPPP Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BPPP Bitung	20	27	8	-	-	-	-	55
	Total	294	170	86	9	-	2	-	561

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa bidang usaha kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang ditingkatkan pada Triwulan III ini hanya 5 bidang

usaha, yakni budidaya, penangkapan, pengolahan/pemasaran, garam dan pengawasan dengan persentase paling banyak adalah bidang usaha budidaya sebesar 52,41%, sedangkan persentase masing-masing bidang usaha lainnya dapat dilihat pada gambar 13 di bawah. Terdapat 2 bidang usaha lainnya yang belum terdapat peningkatan, yakni bidang usaha Wisata Bahari, dan Konservasi.



Gambar 14 Persentase kelompok yang ditingkatkan kelasnya berdasarkan bidang usaha Triwulan III Tahun 2025

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini didukung dari kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten yang memahami potensi kelompok, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dapat memotivasi kelompok sehingga menumbuhkan antusiasme kelompok untuk meningkatkan kapasitas kelompoknya. Dukungan Pemda dan stakeholder terkait dapat dijaga sinerginya oleh penyuluh. Selain itu, kelompok telah mampu melakukan penilaian yang memenuhi kriteria untuk dapat dinaikkan kelasnya sesuai dengan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

Kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah kegiatan penilaian kenaikan kelas kelompok dan penyampaian piagam kenaikan kelas kelompok. Dan dilakukan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan Pusluh KP dengan instrument monitoring dari perjanjian kinerja, manual iku, pelaporan online penyuluh perikanan, verifikasi, validasi dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan. Setiap penyuluh

perikanan telah melakukan pendampingan kepada kelompok antara lain melakukan penyuluhan serta mengidentifikasi kelompok yang berpotensi naik kelas hingga melakukan penilaian kelas terhadap kelompok binaannya yang juga mendukung penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) penyuluh perikanan. Koordinasi dengan Pemda selalu dijalankan terkait dengan pengembangan kapasitas kelompok dari program-program unggulan BPPSDM.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 13.673.325.833,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 11.585.178.473,- (84,73%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dibentuk pada tahun berjalan, dengan kriteria pembentukan kelompok berdasarkan Permen KP No. 28 tahun 2024 tentang Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh Instansi yang berwenang mengukuhkan berdasarkan Permen KP No. 28 tahun 2024 tentang Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Pada Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025 ditetapkan target 4.100 kelompok. Capaian Triwulan III Kelompok pelaku usaha /pelaku pendukung yang dibentuk (Kelompok) tersaji pada Tabel 17.

Tabel 17 Capaian IKK 3-Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)

IKK 3-Kelompok Pelaku Usaha /Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)											
Realisasi TW III				Tahun 2025				%	Renja Pusluh KP		
2021*	2022*	2023*	2024	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III		Target 2025	% Capaian thdp Target Renja 2025	
3.053	3.260	3.473	2.980	4.100	1.719	1997	116,17%	-32,99	4.100	48,7%	

*Capaian 2021-2023 (Puslatluh)

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini, IKK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk telah tercapai sebanyak 1.997 kelompok dari target sebesar 1.719 kelompok atau terealisasi 116,17%.

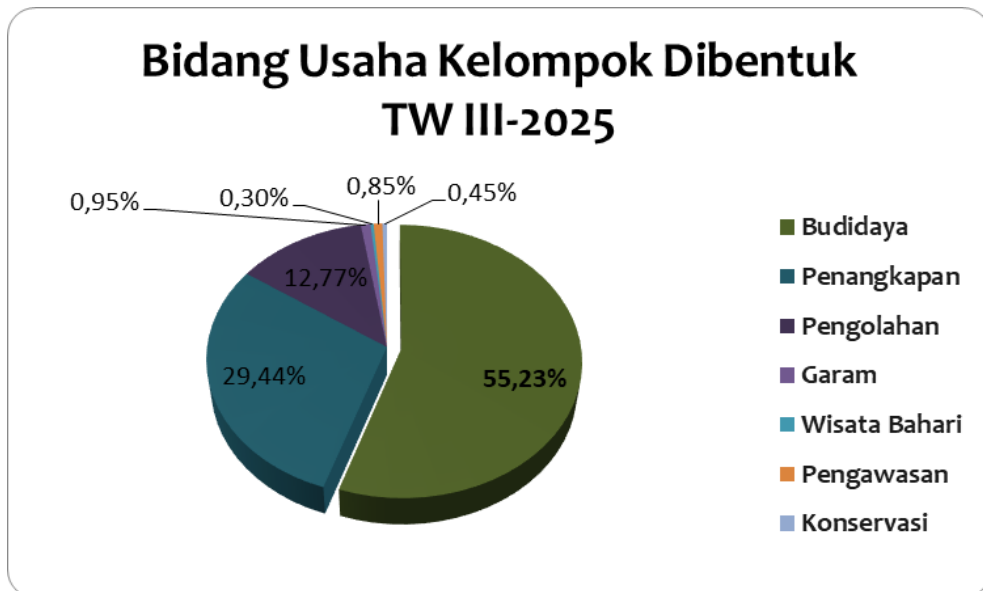
Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 32,99% disebabkan adanya penyesuaian dari Kepmen KP No.14 Tahun 2012 ke Permen KP No. 28 Tahun 2024 sehingga mengakibatkan penurunan target dan juga karena adanya pemberlakuan efisisensi anggaran diseluruh kegiatan. Apabila dibandingkan dengan target Renja Pusluh KP 2025 telah tercapai sebesar 48,7% dari target 4.100 kelompok.

Rincian capaian Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Penyuluhan KP kepada Kepala BPPSDM KP Nomor 729/BPPSDM.2/RC.610/X/2025 perihal Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Utama Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk Triwulan III Tahun 2025, tersaji pada Tabel 18.

Tabel 18 Rincian capaian Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku pendukung yang Dibentuk

	UPT/ Satminkal	Budidaya	Penang kapan	Pengolahan /Pemasaran	Garam	Wisata Bahari	Pengawas an	Konser vasi	Jumlah
1	BBRBLPP Gondol	110	97	25	3	2	2	1	240
2	BRPPUPP Palembang	82	43	27	-	-	3	-	155
3	BRPBAPPP Maros	119	79	21	1	-	-	2	222
4	BRPBATPP Bogor	293	65	49	6	2	2	3	420
5	BPPP Medan	241	123	41	1	1	3	-	410
6	BPPP Ambon	17	43	19	-	-	1	-	80

	UPT/ Satminkal	Budidaya	Penang- kapan	Pengolahan /Pemasaran	Garam	Wisata Bahari	Pengawas- an	Konser- vasi	Jumlah
7	BPPP Banyuwangi	205	73	54	8	1	6	3	350
8	BPPP Tegal	36	65	19	-	-	-	-	120
	Total	1103	588	255	19	6	17	9	1997



Gambar 15 Persentase bidang usaha kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang dibentuk Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan rincian capaian kelompok dibentuk per SATMINKAL, diperoleh kontribusi terbanyak dari BRPBATPP Bogor dengan 293 kelompok yang dibentuk. Apabila dari total rincian capaian kelompok yang dibentuk dibagi berdasarkan keragaan usahanya dapat dilihat pada Gambar 14. Kelompok yang dibentuk terdiri dari Kelompok Budidaya sebesar 55,23%, Kelompok Penangkapan sebesar 29,44%, Kelompok Pengolahan/Pemasaran sebesar 12,77%, dan Kelompok lainnya yakni Kelompok Garam, Wisata bahari, Pengawasan dan Konservasi kurang dari 1%.

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini didukung dari kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten, menguasai ilmu-ilmu baru, inovatif, terampil, solutif, tanggap, paham terhadap potensi setiap kelompok yang akan dibentuk, menguasai mekanisme pembentukan kelompok baru, dan mampu bersinergi dengan lembaga terkait. Selain itu, adanya bantuan pemerintah juga menjadi faktor mendukung tumbuhnya kelompok-kelompok

baru binaan penyuluh dari masing-masing SATMINKAL penyuluhan kelautan dan perikanan.

Kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah penyampaian Berita Acara Pembentukan Kelompok, Piagam Pengukuhan, dan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok. Dan dilakukan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan Pusluh KP dengan *instrument* monitoring dari perjanjian kinerja, manual iku, pelaporan online penyuluh perikanan, verifikasi dan validasi dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluh perikanan telah melakukan pendampingan kepada kelompok antara lain melakukan penyuluhan serta mengidentifikasi wilayah binaannya yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru yang juga mendukung penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) penyuluh perikanan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 12.801.381.333,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.711.892.373,- (83,68%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, b. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Indikator kinerja ini diperoleh dari total penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dengan penerimaan bukan pajak lainnya. Merupakan indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi *maximize*. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa data realisasi pendapatan dari aplikasi Omspan per tanggal 10 bulan berikutnya dan/atau surat penyampaian realisasi PNBP dari Sekretariat BPPSDM KP.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan target PNBP sebesar Rp. 2,364 Milyar. Capaian Triwulan III Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar) pada Triwulan III tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19 Capaian IKK 4- Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)

IKK 4-Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)										
Realisasi TW III				Tahun 2025				%	Renja Pusluh KP	
2021*	2022*	2023*	2024	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	Kenaikan TW III 2024-2025	Target 2025	% Capaian thdp Target Renja 2025
-	-	-	2,63	2,364	0,75	1,25	120%	-52,47	2,364	52,9%

*Capaian 2021-2023 (Puslatluh)

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini, IKK Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah tercapai sebanyak Rp. 1,25 Milyar dari target sebesar Rp. 0,75 Milyar atau terealisasi 166,67%, namun karena nilai maksimal pada Aplikasi Kinerjaku adalah 120% maka persentase capaian IKK ini adalah 120%.

Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 52,47% disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun anggaran. Apabila dibandingkan dengan target Renja Pusluh KP 2025 telah tercapai sebesar 52,9% dari target Rp. 2,364 Milyar.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satuan kerja lingkup Pusluh KP sesuai surat Plh. Sekretaris BPPSDM nomor 3143/BPPSDM.1/KU.340/X/2025 perihal Capaian kinerja PNBP Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja Lingkup Pusluh KP

No	Satuan Kerja	Target TW III	Realisasi Rupiah Miliar	Realisasi Rupiah
	Total Realisasi Lingkup Pusat Penyuluhan	0,75	1,25	1.246.032.817
1	Pusluh KP	-	0,112	111.707.859
2	BBRBLPP, Gondol	0,045	0,184	184.698.050
3	BRPPUPP, Palembang	0,030	0,039	39.292.360
4	BRPBAPPP, Maros	0,600	0,826	826.015.392
5	BRPBATPP, Bogor	0,074	0,084	84.319.156

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini didukung dari optimalisasi lahan riset berupa lahan budidaya, laboratorium, gedung bangunan. Selain itu, didukung pula dengan sumber daya alam pelayanan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Sehingga diperolehnya pendapatan dari beberapa penerimaan negara baik penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Selain itu, dengan adanya kontrak kinerja untuk penerimaan PNBP sehingga dapat memacu pendapatan dari setiap satuan kerja. Didukung juga komitmen pimpinan unit kerja dan kesanggupan tim kerja dalam kegiatan dalam mencapai target PNBP.

Kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah telah dilakukan pendataan sarana prasarana riset yang baik di lingkup Pusluh KP dan pengoptimalan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana. Sehingga memperoleh pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Selain itu, dilakukannya pemantauan dan evaluasi setiap bulannya agar kontrak kinerja yang ditargetkan dapat tercapai dengan baik.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Monitoring capaian PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan KP dengan anggaran sebesar Rp. 44.180.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.850.000 (8,71%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP No. 28 tahun 2024 tentang Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan target 300 kelompok. Capaian Triwulan III Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan pada Triwulan III tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21 Capaian IKK 5- Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)

IKK 5- Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)										
Realisasi TW III				Tahun 2025				%	Renja Pusluh KP	
2021*	2022*	2023*	2024	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	Kenaikan TW III 2024-2025	Target 2025	% Capaian thdp Target Renja 2025
-	-	-	-	300	172	222	120%	-	300	74%

*Capaian 2021-2023 (Puslatluh)

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini, IKK Gabungan Kelompok/ Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan telah tercapai sebanyak 222 unit dari target sebesar 172 unit atau terealisasi 129,07%, namun karena nilai maksimal pada Aplikasi Kinerjaaku adalah 120% maka persentase capaian IKK ini adalah 120%.

IKK ini merupakan IKK baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target Renja Pusluh KP 2025 telah tercapai sebesar 74% dari target 300 kelompok.

Rincian capaian Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Penyuluhan KP kepada Kepala BPPSDM KP Nomor 730/BPPSDM.2/RC.610/X/2025 perihal Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Utama Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Triwulan III Tahun 2025, tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22 Rincian capaian Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan

No	Satminkal	Gapokkan	Koperasi	Korporasi	Grand Total
1	BBRBLPP Gondol	37	5	-	42
2	BRPPUPP Palembang	12	3	-	15
3	BRPBAPPP Maros	6	24	-	30
4	BRPBATPP Bogor	8	28	-	36
5	BPPP Medan	26	2	-	28
6	BPPP Ambon	11	0	-	11
7	BPPP Banyuwangi	30	9	1	40
8	BPPP Bitung	6	14	-	20
	Total	136	85	1	222

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini didukung dari keaktifan penyuluh kelautan dan perikanan dalam memberikan pendampingan baik kelompok gabungan (gapokan) maupun koperasi/korporasi yang telah terbentuk tahun sebelumnya.

Kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini salah satunya adalah pertemuan rutin yang diadakan baik mingguan maupun bulanan untuk mengidentifikasi masalah, mendiskusikan serta mengatasi kendala dengan berdasarkan kesepakatan bersama kelompok.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan NSPK Kelembagaan Penyuluhan KP dengan anggaran sebesar Rp. 12.261.008.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.660.586.655 (78,79%).

SASARAN KEGIATAN 2

Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)

Inovasi teknologi yang diterapkan untuk penyuluhan masyarakat kelautan dan perikanan merujuk pada penggunaan teknologi tepat guna dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan. Inovasi teknologi yang diterapkan merupakan teknologi yang telah mendapatkan rekomendasi dan/atau revidi dan tercatat sebagai materi penyuluhan yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMKP. Inovasi teknologi ini bersumber dari BPPSDMKP atau unit kerja KKP.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah telah dilakukan seleksi 1 dan 2 atas usulan teknologi kelautan dan perikanan yang direkomendasikan untuk materi penyuluhan, dari 22 (dua puluh dua) usulan yang telah mengikuti seleksi 2, terdapat 11 (sebelas) usulan yang akan diajukan guna ditetapkan sebagai teknologi KP terekomendasi untuk materi penyuluhan oleh Kepala BPPSDM KP, yaitu:

1. LARITA (Lampu Ri Tallangang) Lampu Yang Ditenggelamkan;
2. BULIRADE (Bubu Lipat Rajungan Ramah Lingkungan Berkode);
3. Alat Pengeringan Ikan Otomatis Dengan Pemantauan Jarak Jauh IoT (DryFiTech),
4. Pengembangan Budidaya Kepiting Bakau Menggunakan Crab Drum;
5. Vanamerator hebat tradisional;
6. Inovasi pembuatan Es Tontong Menjadi Es Krim Rumput Laut;
7. TAIGAN GENERASI 5 Plus Asap Cair (Alat asap ikan serbaguna skala rumah tangga);
8. Budidaya Belut Sawah Sistem Bertingkat (BALUIK);
9. ALTIS alat transportasi ikan segar;
10. Alat Pencuci Tali Bentang atau Longline Rumput Laut (Roll Brush Rope Cleaner)
11. Pendederan Lobster Air Laut Menggunakan AqTes (Aquaculter Terracing System)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

Materi/Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah Materi/ Metode Penyuluhan yang disusun oleh Pusat Penyuluhan KP dan UPT Penyuluhan KP, Penyuluh kelautan dan perikanan yang bersifat informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah telah disusun sebanyak 4 (empat) materi penyuluhan terkait pelatihan/bimbingan teknis bagi Penyuluh KP dalam rangka mendukung pencapaian program nasional dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan Swasembada Garam serta Penyelenggaraan Ruang Laut yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Satminkal Penyuluhan KP.

Materi Penyuluhan yang disusun adalah:

1. Buku Kumpulan perizinan berusaha dan legalitas produk kelautan dan perikanan (PIRT, HALAL,NIB,MD,SNI);
2. Buku Informasi program KKP Log book penangkapan ikan elektronik (eLBPI) dan Buku kapal perikanan elektronik (e-BKP);
3. Buku Sertifikasi produk perikanan proiimer dan pasca panen (CBIB,CPIB,SKP,HACCP,CPPIB,SPDI,CPIB KAPAL,CPOIB dan CDOIB);
4. Buku Daftar peraturan perundang-undangan terkait kebijakan ekonomi biru sebagai program prioritas kementerian kelautan dan perikanan.

Dalam proses penyusunan terdapat 3 materi, yakni Buku ttg Dukungan Program Nasional (vicon, bimtek, sosialisasi, pelatihan, webinar) dll; Pedoman Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)-revisi; Buku Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)

Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan teknologi tepat guna dari teknologi terekomendasi. Teknologi terekomendasi yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi teknis, lingkungan, social,

ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan. Hasil dari Percontohan penyuluhan berupa inovasi teknologi tepat guna. Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan ini bertujuan untuk memperoleh inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik teknis, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan keberlanjutan sumber daya KP.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah telah terdapat 3 kelompok dengan beberapa tematik SFV UPT, yaitu di Minapadi terdapat 1 kelompok, di Wanamina 1 kelompok dan Budidaya udang 1 kelompok.

SASARAN KEGIATAN 3

Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village*) di Lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village*) di Lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village*) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Desa)

SFV merupakan konsep pengembangan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan Cerdas/ *Smart Fisheries Village* (SFV). Sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDM, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/ *Smart Fisheries Village* SFV akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah telah disusun draft Perjanjian Kerjasama antara BPPSDMKP dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan telah disampaikan ke Sekretariat BPPSDM untuk ditindaklanjuti, sesuai surat Kepala Pusat Penyuluhan KP Nomor 2101/BPPSDMKP.1/KS.310/VII/2025, tentang Telaah

kerjasama BPPSDM dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Perjanjian Kerjasama tentang Sinergi Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Boyolali, dengan tujuan untuk pengembangan kegiatan Penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, serta ruang lingkup adalah: 1) Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat; 2) pendampingan Penyuluhan; 3) penyelenggaraan kerja sama bidang pengembangan kelautan dan perikanan.

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

Penyuluh Perikanan yang Kompeten (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Potensi dan *Situasional Judgement Test* (SJT) sebanyak 151 penyuluh pada tanggal 22 dan 23 Juni 2025, pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi Untuk Pengisian Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebanyak 29 orang telah lulus periode I pada Agustus 2025 sesuai surat Nomor 2880/BPPSDM.1/KP.930/IX/2025, dan akan dilaksanakan Penilaian Potensi dan Kompetensi Untuk Pengisian Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan periode ke II dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang penyuluh.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11**Persentase Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (%)**

Merupakan indikator yang menunjukkan presentase jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah penyuluh telah mengikuti beberapa pelatihan teknis, dan sedang dilakukan proses verifikasi dan validasi sertifikat pelatihan. Dengan target 2% dari jumlah penyuluh per Januari 2025, sampai dengan September 2025 telah tercapai sesuai hasil verifikasi dan validasi sementara sebanyak 59 orang penyuluh yang telah melaksanakan pelatihan teknis.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 12**Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Disusun (NSPK)**

Merupakan jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Penyuluhan pada Tahun 2025. NSPK disusun dengan melibatkan Stakeholder dan Bagian Hukum Sekretariat BPPSDM dan atau Biro Hukum sesuai dengan tingkat kewenangan NSPK yang dibuat

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah telah dihasilkan 4 (empat) NSPK dan 3 (tiga) draft NSPK yang masih dalam progress penyusunan.

NSPK yang sudah dihasilkan, yakni:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencabutan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penilai Kemampuan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP Perikanan;

3. Perka BPPSDM KP tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan;
4. Perka BPPSDM KP tentang Tim Pelaksana Seleksi dan Penilaian Rekomendasi Teknologi.

Dalam proses harmonisasi dan penandatanganan terdapat 3 NSPK, yaitu:

1. Permen KP Penyelenggaraan Penyuluhan KP (proses harmonisasi);
2. Keputusan Kepala BPPSDM KP tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP (menunggu tandatangan Kepala BPPSDMKP);
3. Keputusan Kepala BPPSDM KP tentang Rekomendasi Teknologi KP Sebagai Materi Penyuluhan (menunggu tandatangan Kepala BPPSDMKP).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 13

Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)

Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan pengelolaan basis data yang meliputi pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan data yang tersimpan dalam suatu sistem basis data penyuluhan kelautan dan perikanan. Pengelolaan basis data ini untuk memastikan data yang tersimpan dapat diakses dengan mudah, konsisten dan aman. Metode pengukuran pengelolaan basis data menggunakan aplikasi repository yang digunakan untuk keperluan pengelolaan data penyuluhan kelautan dan perikanan yang terdiri dari: (1) data penyuluh perikanan KP, (2) data kelompok yang pelaku usaha dan pelaku pendukung yang dibentuk, (3) data kelompok yang pelaku usaha dan pelaku pendukung disuluh, (4) data kelompok yang pelaku usaha dan pelaku pendukung ditingkatkan kelas, (5) Data kegiatan Program Prioritas, (6) Data penilaian mandiri SAKIP, (7) Data dalam mendukung Level 1 pada Pusat Penyuluhan KP.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah inventarisasi basis data penyuluhan dan penyusunan draft laporan pengelolaan basis data. Telah disusun 3 (tiga) guide book penggunaan aplikasi penyuluh, yaitu guide book untuk penyuluh, untuk Pusat dan untuk UPT. Dokumentasi penggunaan aplikasi dapat dilihat pada link berikut:

1. Penyuluh:
<https://digiluhs-organization.gitbook.io/digiluh-apps>
2. Admin Pusat:
<https://digiluhs-organization.gitbook.io/digiluh-apps/manual-book-admin-pusat-digiluh>
3. Admin UPT:
<https://digiluhs-organization.gitbook.io/digiluh-apps/manual-book-admin-upt-digiluh>

SASARAN KEGIATAN 5

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 14

Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan (Unit)

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa sampai dengan Triwulan III belum terlaksananya kegiatan dikarenakan blokir anggaran karena adanya efisiensi.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 15

Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)

Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa bahwa sampai dengan Triwulan III adalah belum terlaksananya kegiatan dikarenakan blokir anggaran karena adanya efisiensi.

SASARAN KEGIATAN 6

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 16

Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)

Jumlah dokumen kerja sama Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan antar lembaga dan internasional yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah melanjutkan beberapa kerjasama yang telah disepakati tahun sebelumnya sebanyak 9 (sembilan) kerjasama sebagaimana pada tabel 23 berikut:

Tabel 23 Kerjasama lingkup Pusat penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025

No	Satker	No Perjanjian	Mitra
1	BRPPUPP, Palembang	47/BPPSDM/KKP/PKS/X/2023 B/687/UN31.UT9/HK.08.00/2023	Universitas Terbuka Daerah Palembang
2	BRPPUPP, Palembang	B.1421/BPPSDM-BRPPUPP/PL.210/X/2023 021/BRPPUPP-DP/PKS/X/2023	PT DIZAMATRA POWERINDO
3	BRPBAPPP, Maros	11/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024 001/SPK/EXT/02/2024	COMMON ROOM NETWORKS FONDATION (COMMON ROOM)
4	BRPBAPPP, Maros	47/BPPSDM/KKP/PKS/IX/2024 0005.Mou/STH.01.01/PLNIP200000/2024	PT PLN Indonesia Power UBP BARRU

No	Satker	No Perjanjian	Mitra
5	BRPBATPP, Bogor	35/BPPSDM/KKP/PKS/VIII/2024 837/PK.01.02/SMKN2-Cadisdik.IX	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Indramayu
6	BRPBATPP, Bogor	B/105/UN57.F4/KS.05.00/2024 2/BPPSDM/KKP/PKS/I/2024	Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar
7	BBRBLPP, Gondol	B.135/BRSDMBBRBLPP/PL.700/V/2022	UD Hadi Rama
8	BBRBLPP, Gondol	B.968/BBRBLPP/PL.720/V/2025 B.2019/KC-X/V/2025	PT BANK Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabang Singaraja
9	BBRBLPP, Gondol	B.951/BBRBLPP/PL.720/V/2025 B.08/KOP-BLD/V/2025	Koperasi Pegawai BALIDITA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 17

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan target 85% rekomendasi hasil pengawasan yang telah tuntas ditindaklanjuti. Capaian Triwulan III Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tersaji pada Tabel 24.

Tabel 24 Capaian IKK 17 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

IKK 17-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)											
Realisasi TW III				Tahun 2025				%	Renja Pusluh KP		
2021*	2022*	2023*	2024	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	Kenaikan TW III 2024-2025	Target 2025	% Capaian thdp Target Renja 2025	
-	-	-	-	85	85	100	117,65%	21,95	85	117,65%	

*Capaian 2021-2023 (Puslatluh)

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini, IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah tercapai sebanyak 100% dari target sebesar 85% atau terealisasi 117,65%.

Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 21,95% disebabkan oleh terselesaikannya dengan tepat waktu dan dokumen tindaklanjut sesuai dengan yang direkomendasikan. Apabila dibandingkan dengan target Renja Pusluh KP 2025 telah tercapai sebesar 117,65% dari target 85%.

Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusluh KP dalam persentase rekomendasi hasil pengawasan Triwulan III Tahun 2025 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Mengacu kepada Nota Dinas Kepala BPPSDM, Nomor : 953/BPPSDM/HP.510/X/2025 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, tanggal 14 Oktober 2025, maka nilai eselon II lainnya dapat dilihat pada Tabel 25.

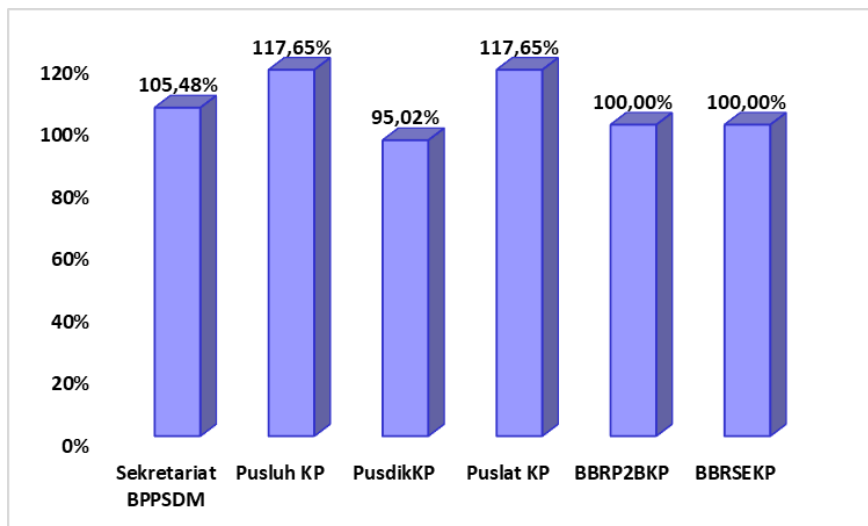
Tabel 25 Nilai Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPPSDM Triwulan III Tahun 2025

No.	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BPPSDM KP	58	52	89,66
23	Pusdik KP	26	21	80,77
4	Puslat KP	4	4	100,00
5	Pusluh KP	25	25	100,00
6	BBRP2BKP	0	0	0
7	BBRSEKP	0	0	0

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Puslat KP, Pusdik KP, BBRP2BKP dan BBRSEKP maka persentase capaian Pusluh KP sama dengan Puslat KP, yakni 100%, sebagaimana Tabel 26.

Tabel 26 Perbandingan IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BPPSDM	Pusluh KP	PusdikKP	Puslat KP	BBRP2BKP	BBRSEKP
Target	85	85	85	85	85	85
Realisasi	89,66	100	80,77	100	85	85
Persentase (%)	105,48%	117,65%	95,02%	117,65%	100,00%	100,00%



Gambar 16 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja ini adalah telah ditindaklanjutnya temuan pada Pusat Penyuluhan KP pada Triwulan III Tahun 2025, sesuai surat penyampaian/nota dinas dari Kepala BPPSDM Nomor: 953/BPPSDM/HP.510/X/2025 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, dari 25 temuan telah ditindaklanjuti sebanyak 25 temuan, sehingga tercapai 100%.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan

melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Penyuluhan KP Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Resiko Kebijakan dengan anggaran sebesar Rp. 4.530.076.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.374.603.437,- (74,49%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 18

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III nilai IKPA yang diperoleh sebesar 95,93% dengan 2 komponen didalam IKPA yang masih di bawah bobot yang telah ditetapkan, yaitu komponen penyerapan anggaran dan UP/TUP.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 19

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah telah dilaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan KP dengan nilai SAKIP 83,55.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 20

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk

menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan triwulan III adalah telah dilakukan rekon capaian output dengan tim keuangan dan penginputan capaian realisasi fisik pada aplikasi Monev Kemenkeu.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 21

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah penginputan dokumen bukti diklat atau seminar yang diikuti oleh pegawai ke dalam Portal KKP. Nilai IP ASN Pusat penyuluhan KKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 85.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 22

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan target 80% Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Capaian IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tersaji pada Tabel 27.

Tabel 27 Capaian IKK 22 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

IKK 22- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)										
Realisasi TW III				Tahun 2025				%	Renja Pusluh KP	
2021*	2022*	2023*	2024	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	Kenaikan TW III 2024-2025	Target 2025	% Capaian thdp Target Renja 2025
-	-	-	-	80	80	100	125%	-	80	125%

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini, IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan

Perikanan telah tercapai sebanyak 100% dari target sebesar 80% atau terealisasi 125%, namun karena nilai maksimal pada Aplikasi Kinerjaku adalah 120% maka persentase capaian IKK ini adalah 120%.

IKK ini merupakan IKK baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target Renja Pusluh KP 2025 telah tercapai sebesar 125% dari target 80%.

Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Pusluh KP dalam Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Mengacu kepada Surat Nota Dinas Plh. Sekretaris BPPSDM Nomor : 3115/BPPSDM.1/PL.410/X/2025 perihal “Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan III TA. 2025”, tanggal 9 Oktober 2025, maka nilai eselon II lainnya dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Triwulan III Tahun 2025

No.	Satker	Rekap RUP Terumumkan	%
1	Pusat Penyuluhan KP	7,284,200,000	100%
2	BBRP2BKP	5,100,517,000	100 %
3	BBRSEKP	96,216,000	100 %

Jika dibandingkan dengan capaian BBRP2BKP dan BBRSEKP dengan nilai 100% maka nilai capaian Kinerja Pusluh KP adalah sama yakni 100% dengan persentase capaian yang sama sebesar 120%.

Faktor keberhasilan capaian IKK ini adalah upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan III tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan pendukung tercapainya IKK ini adalah melakukan identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi,

yang disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Penatausahaan Aset dengan anggaran sebesar Rp. 6.527.722.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.853.056.038,- (89,66%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 23

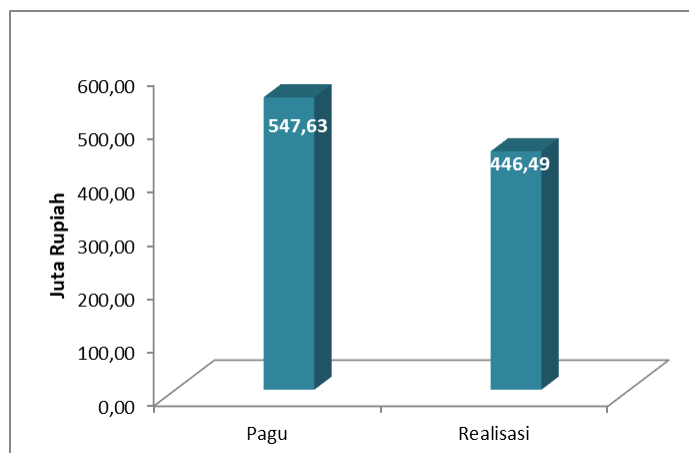
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat capaian pada IKK ini, capaian akan diukur pada Triwulan IV. Namun dapat disampaikan bahwa progress sampai dengan Triwulan III adalah pengajuan RKBMN, Penghapusan Aset Tak Berwujud, penghapusan peralatan dan mesin 2 paket, penghapusan motor 3 paket, BAST Gedung Piamari, dan BAST tanah Muara Kamal.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Triwulan III Tahun 2025 Program dan Kegiatan unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp. 446.489.958.856,- atau 81,53% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 547.627.888.000,-.



Gambar 17. Realisasi anggaran Lingkup Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025

Dalam pelaksanaan anggaran, sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 terdapat 6 (enam) kali revisi pagu anggaran pada Pusat Penyuluhan KP disebabkan adanya blokir anggaran, rekomposisi blokir, relaksasi blokir, dan RPD TW II, RPD TW III dan penghapusan blokir sebagaimana Tabel 29.

Tabel 29 Revisi Anggaran Pusat Penyuluhan KP sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

No.	DIPA	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Tanggal pengesahan	Dasar Revisi	Keterangan
1	DIPA awal	34.009.510.000	814.804.000	2 Desember 2024	Inpres No.1/2025	Alokasi Anggaran
2	DIPA Revisi 1	34.009.510.000	8.622.099.000	21 Februari 2025	1. Inpres No.1/2025 2. Surat Kemenkeu No. S-75/MK.02/2025	Pencantuman blokir
3	DIPA Revisi 2	34.009.510.000	9.422.099.000	20 Maret 2025	1. PP No.11/2025 2. Surat Kepala BKN No. 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 3. Surat Men KP No. B.241/Men-SJ/RC.420/III/2025	Rekomposisi Blokir
4	DIPA Revisi 3	34.009.510.000	9.157.964.000	9 April 2025	Surat Kepala BPPSDM KP Nomor. B.747/BPPSDM/RC.420/III/2025	Relaksasi Blokir
5	DIPA Revisi 4	34,009,510,000	9,157,964,000	22 April 2025	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Kepala BPPSDM KP Nomor. 489/KPA/BPPSDM/RC.420/IV/2025	RPD TW II
6	DIPA Revisi 5	34,009,510,000	9,157,964,000	9 Juli 2025	Surat Kuasa Pengguna Anggaran 811/KPA/BPPSDM/RC.420/VII/2025	RPD TW III
7	DIPA Revisi 6	24,851,546,000	-	1 September 2025	Surat Kepala BPPSDM B.1914/BPPSDM/RC.420/VIII/2025	Penghapusa Blokir

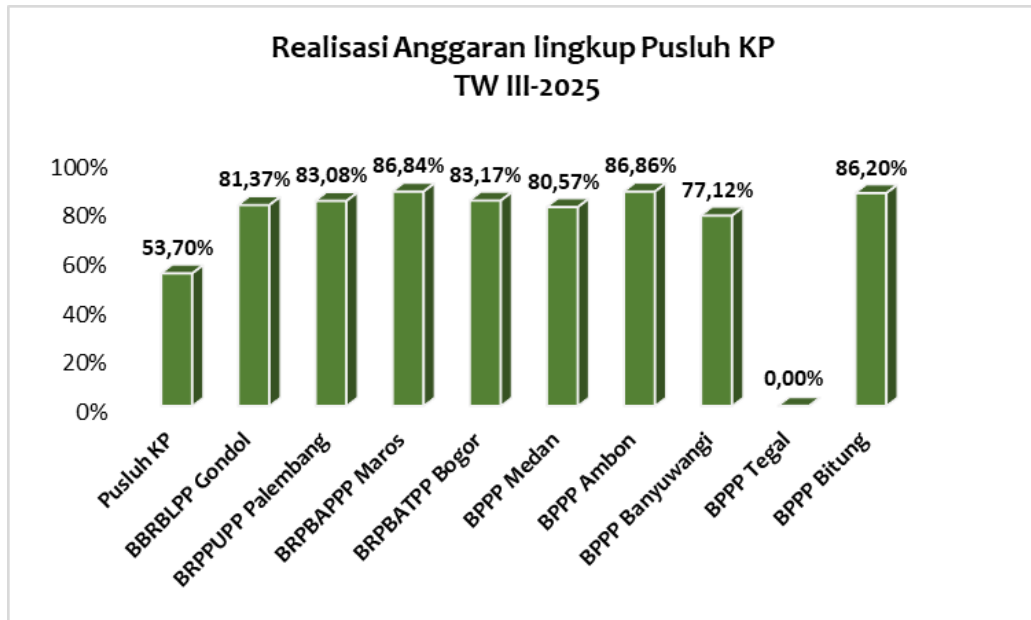
Realisasi anggaran lingkup Pusat Penyuluhan KP per 30 September 2025 telah mencapai 81,53% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 446.489.958.856,-

dari pagu anggaran sebesar Rp. 547.627.888.000,- dengan rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 30:

Tabel 30 Realisasi Anggaran Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025

	Pagu DIPA	Pagu Evaluasi Renaksi	Realisasi Evaluasi Renaksi	Kroscek	%
Pusluh KP	24,851,546,000	24,851,546,000	13,345,066,154	-	53.70%
BBRBLPP Gondol	60,532,775,000	60,532,775,000	49,254,103,918	-	81.37%
BRPPUPP Palembang	73,228,299,000	73,228,299,000	60,836,299,951	-	83.08%
BRPBAPPP Maros	92,498,523,000	92,498,523,000	80,321,643,701	-	86.84%
BRPBATPP Bogor	85,010,800,000	85,010,800,000	70,705,642,047	-	83.17%
BPPP Medan	55,479,594,000	55,479,594,000	44,699,852,486	-	80.57%
BPPP Ambon	37,443,646,000	37,443,646,000	32,522,960,621	-	86.86%
BPPP Banyuwangi	81,157,478,000	81,157,478,000	62,587,210,031	-	77.12%
BPPP Tegal	48,800,000	48,800,000	-	-	0.00%
BPPP Bitung	37,376,427,000	37,376,427,000	32,217,179,947	-	86.20%

Total	547,627,888,000	547,627,888,000	446,489,958,856		81.53%
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	---------------



Gambar 18. Persentase Realisasi anggaran Lingkup Pusat Penyuluhan KP Triwulan III Tahun 2025

Secara umum kinerja Pusluh KP Tahun 2025 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan tercapai secara optimal. Namun penyerapan anggaran harus dapat ditingkatkan pada akhir tahun.

Tabel 31 Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan III Tahun 2025

EFISIENSI INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	%	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pendukung yang Disuluh (Kelompok)	21600	24273	112,38%	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	21.042.786.833	18.903.370.174	89,83
2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	435	561	120% (128,97%)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	13.673.325.833	11.585.178.473	84,73
3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)	1719	1997	116,17%	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	12.801.381.333	10.711.892.373	83,68
4	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	0,749	1,25	120% (166,84%)	Monitoring capaian PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan KP	44.180.000	3.850.000	8,71

EFISIENSI INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	%	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)	172	222	120% (129,07%)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	12.261.008.000	9.660.586.655	78,79
6	Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)	-	-	-	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	170.000	170.000	100,00
7	Materi/Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	-	-	-	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14.121.954.000	9.663.657.686	68,43
8	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	-	-	-	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan percontohan Penyuluhan	597.135.000	128.773.100	21,57
-	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Desa)	-	-	-	Penerapan percontohan SMART FISHERIES VILLAGE (SFV) Penyuluhan KP	-	-	-

EFISIENSI INDIKATOR KINERJA				TARGET TW III	CAPAIAN TW III	%	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
10	Penyuluh Perikanan yang Kompeten (Orang)			-	-	-	Layanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Penyuluhan KP	9.000.000	-	0,00
11	Persentase Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (%)			-	-	-	Layanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Penyuluhan KP	152.440.537.000	124.869.762.177	81,91
12	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Disusun (NSPK)			-	-	-	Layanan Publik dan Kehumasan Penyuluhan KP	1.020.000	1.020.000	100,00
13	Pengelolaan Basis Data dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)			-	-	-	Pelayanan Data dan Informasi BPPSDMKP	2.380.000	2.380.000	100,00
14	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan (Unit)			-	-	-	Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	-	-	-
15	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)			-	-	-	Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-

EFISIENSI INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	%	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
16	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	-	-	-	Layanan Kerjasama Penyuluhan KP	12.855.500	8.538.500	66,42
17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	85	100	117,65	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Penyuluhan KP	4.530.076.000	3.374.603.437	74,49
18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	-	-	-	Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyuluhan KP	308.795.260.500	251.370.546.741	81,40
19	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	-	-	-	Pelayanan Monitoring dan Evaluasi	39.600.000	13.540.000	34,19
20	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	-	-	-	Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran	38.227.000	9.941.000	26,01
21	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	-	-	-	Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	28.850.000	9.886.000	34,27

EFISIENSI INDIKATOR KINERJA			TARGET TW III	CAPAIAN TW III	%	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
22	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)		80	100	120 (125)	Penatausahaan Aset Kebijakan Penyesuaian	6.527.722.000	5.853.056.038	89,66
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)		-	-	-	Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	660.419.000	319.206.500	48,33
NPSS					118,52		547.627.888.000	446.489.958.856	81,53

D. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan satuan kerja di bawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Efisiensi Anggaran

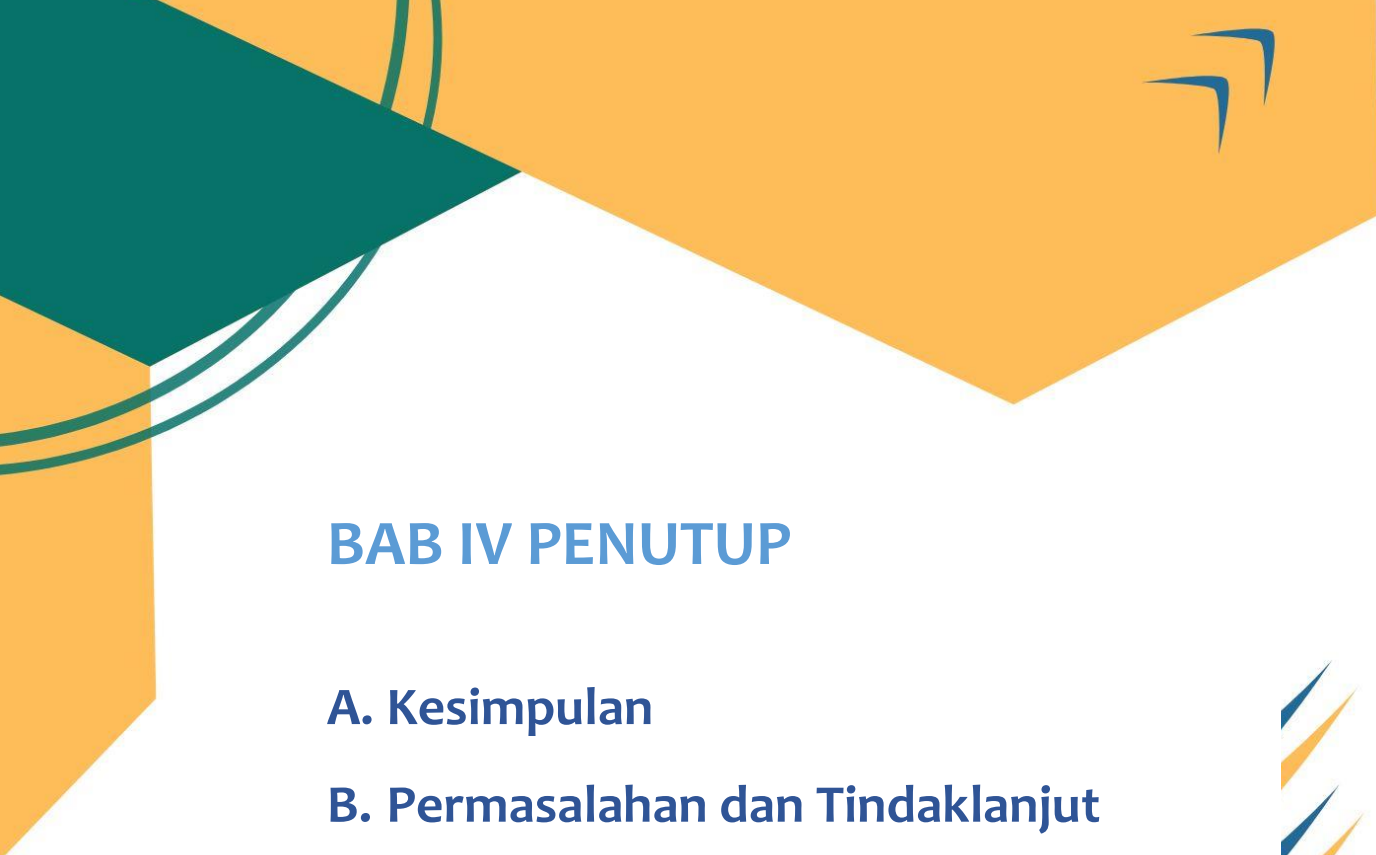
Hasil perhitungan efisiensi anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah hasil pengukuran yang akan didapatkan pada akhir tahun.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran dan sumber daya pada Pusluh KP yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian. Efisiensi tersebut merupakan hasil evaluasi anggaran dan sumber daya yang akan didapatkan setelah melalui reviu anggaran maupun kinerja. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 untuk blokir anggaran telah dihapuskan.

Efisiensi Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) dengan perubahan organisasi dan mutasi pegawai memiliki jumlah PNS sebanyak 2.500 orang pegawai, dengan jumlah PNS sebanyak 1.389 orang, PPPK sebanyak 395 orang, Non PNS (PPNPN, PPB, PJLP) sebanyak 719 orang, diantaranya pegawai tersebut mayoritas tingkat pendidikan S1 dan diikuti oleh Pendidikan S2 dan SMA. Selain itu, Pusluh KP memiliki pegawai

dengan jabatan fungsional perencana yang cukup banyak diantara jabatan fungsional lainnya. Dengan demikian pengelolaan program dan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dapat berjalan secara optimal dengan SDM yang ada sehingga target kinerja dapat tercapai.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Permasalahan dan Tindaklanjut



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan aplikasi kinerja, capaian sasaran strategis Pusluh KP dengan toleransi 0% menunjukkan Status Sasaran Strategis Indikatornya berwarna Biru atau Istimewa. Hal ini karena Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan III Tahun 2025 ini seluruh capaian telah tercapai dengan capaian **117,94%**. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Sasaran Kinerja yang ditetapkan dalam pada Triwulan II Tahun 2025, seluruhnya dapat tercapai sebagai berikut:

1. IKK 1 - Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh, tercapai sebanyak 24.273 Kelompok dari target 21.600 Kelompok (tercapai 112,38%);
2. IKK 2 - Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya, tercapai sebanyak 561 Kelompok dari target 435 Kelompok (tercapai 120%);
3. IKK 3 - Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk, tercapai sebanyak 1.997 Kelompok dari target 1.719 Kelompok (tercapai 116,17%);
4. IKK 4 - Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, tercapai sebanyak 1,25 Rupiah Milyar dari target 0,75 Rupiah Milyar (tercapai 120%);
5. IKK 5 - Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan, tercapai sebanyak 222 unit dari target 172 unit (tercapai 120%);
6. IKK 17 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, tercapai sebanyak 100% dari target 85% (tercapai 117,65%);
7. IKK 22 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, tercapai sebanyak 100% dari target 80% (tercapai 120%);

Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusluh KP Tahun 2025 per 30 September 2025 cukup baik yaitu mencapai Rp. 446.489.958.856,- atau 81,53% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 547.627.888.000,-.

B. Permasalahan dan Tindaklanjut

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dicapai dengan baik, yang persentase pencapaiannya digambarkan mengalami kenaikan pada perkembangan fisik kegiatan dari masing-masing Sasaran Kegiatan di setiap periode waktu baik triwulanan maupun tahunan.

Dalam proses pencapaian target kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan dalam mencapai capaian kinerja, namun pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target setiap indikator kinerja harus dilakukan secara berkala.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Pusluh KP 2025 awal (24 Januari 2025)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)	35.000
		2 Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	1.157
		3 Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)	4.100
		4 Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	2,3649
		5 Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)	300
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6 Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)	1
		7 Materi/Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6
		8 Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	3
3	Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9 Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Desa)	1
4	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	10 Penyuluh Perikanan yang Kompeten (Orang)	50
		11 Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (%)	2
		12 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Disusun (NSPK)	4
		13 Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	1
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluh Kelautan dan Perikanan	14 Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan (Unit)	1
		15 Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5
		17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	85

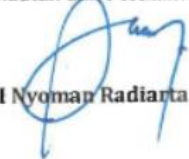
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Kelautan dan Perikanan	18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92
	19	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82
	20	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,5
	21	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
	22	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80
	23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	537.725.594.000
2.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	30.291.405.000
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		568.016.999.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Perjanjian Kinerja Revisi Juni 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak kesatu**

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

26 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Yayan Hikmayani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)	35.000
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	1.157
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)	4.100
		4	Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Milyar)	2,3649
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)	300
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)	1
		7	Materi/Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6
		8	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	3
3	Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Desa)	1
4	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	10	Penyuluh Perikanan yang Kompeten (Orang)	50
		11	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (%)	2
		12	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Disusun (NSPK)	4
		13	Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	1
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluh Kelautan dan Perikanan	14	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan (Unit)	1
		15	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Kelautan dan Perikanan	18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82
		20	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,5
		21	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
		22	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	537.725.594.000
2.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	31.904.162.000
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		569.629.756.000

Jakarta, 26 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Lampiran Surat Tugas Pusat Penyuluhan KP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : B. 10 /BPPSDM.2/KP.440/I/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas:

Kepada : Seluruh pegawai Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Untuk : 1. melaksanakan tugas sebagai Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. melaksanakan dan menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
4. segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan TA. 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan

Jakarta, 2 Januari 2025
Kepala Pusat Penyuluhan KP,


Yayan Hikmayani
NIP. 196710041999032001

Lampiran Surat Tugas Pusat Penyuluhan KP_Revisi 1



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL pusluhkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : B. 1557 /BPPSDM.2/KP.440/VI/2025

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Surat Tugas Nomor B. 10/BPPSDM.2/KP.440/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan surat tugas baru sebagai pengganti Surat Tugas Nomor B. 10/BPPSDM.2/KP.440/I/2025 tanggal 02 Januari 2025.
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas:

- Kepada** : Seluruh pegawai Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- Untuk** : 1. melaksanakan tugas sebagai Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. melaksanakan dan menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
4. segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan TA. 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan

Jakarta, 23 Juni 2025
Kepala Pusat Penyuluhan KP,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani
NIP. 196710041999032001

Lampiran Surat Tugas Pusat Penyuluhan KP_Revisi 2



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL pusluhkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : B.2312/BPPSDM.2/KP.440/IX/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Surat Tugas Nomor: B.2127/BPPSDM.2/KP.440/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan surat tugas baru sebagai pengganti Surat Tugas Nomor: B.2127/BPPSDM.2/KP.440/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas:

- Kepada : Seluruh pegawai Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- Untuk : 1. melaksanakan tugas sebagai Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. melaksanakan dan menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
4. segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan TA. 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan



Jakarta, 1 September 2025
Kepala Pusat Penyuluhan KP,

Yasni Hikmayani
NIP. 196710041999032001

**Pusat Penyuluhan KP
Gedung BPPSDMKP 2, Lantai 3-4
Kompleks Bina Samudera
Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur
Jakarta Utara 14430**

